

Rencana Perbaikan Indeks SPBE Pada Tingkat Kematangan Kapabilitas Proses di Pekab Purworejo

Putri Andriyani

1800016032

Skripsi diajukan kepada
Fakultas Sains dan Teknologi Terapan
sebagai bagian persyaratan untuk meraih derajat

Sarjana Komputer

pada Program Studi Sistem Informasi



Universitas Ahmad Dahlan

Yogyakarta

Mei, 2025

SPBE Index Improvement Plan At The Proces Capability Maturity Level In Purworejo Regency Government

Putri Andriyani

1800016032

The thesis is submitted to the
Faculty of Applied Science and Technology
as part of the requirements to obtain a degree

Bachelor of Computer Science

In the Information Systems Study Program



Ahmad Dahlan University

Yogyakarta

May, 2025

Skripsi

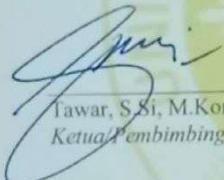
**Rencana Perbaikan Indeks SPBE Pada
Tingkat Kematangan Kapabilitas Proses di
Pekab Purworejo**

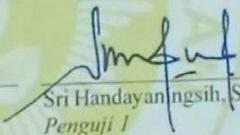
Putri Andriyani

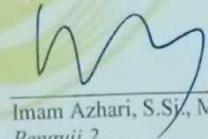
1800016032

Dipertahankan di depan Dewan Penguji

tanggal 28 April 2025


Tawar, S.Si, M.Kom
Ketua Pembimbing


Sri Handayani, S.T., M.T.
Penguji 1


Imam Azhari, S.Si, M.Cs.
Penguji 2

Diterima sebagai bagian
persyaratan untuk meraih
derajat Sarjana Komputer,


Dr. Yudi Ari Adi, S.Si., M.Si
Dekan FAST

Pernyataan

Saya, Putri Andriyani menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam Skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan Saya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis/diterbitkan orang lain, kecuali yang tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar acuan.

Dinyatakan,



Putri Andriyani

Tanggal : 28 Mei 2025

Pernyataan Tidak Plagiat

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Putri Andriyani
NIM : 1800016032
Email : putri1800016032@webmail.uad.ac.id
Program Studi : Sistem Informasi
Fakultas : Sains dan Teknologi Terapan

Judul Skripsi : Rencana Perbaikan Indeks SPBE Pada Tingkat Kematangan Kapabilitas Proses di Pemkab Purworejo

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Hasil karya yang saya serahkan ini adalah asli dan belum pernah mendapatkan gelar kesarjanaan baik di Universitas Ahmad Dahlan maupun di institusi pendidikan lainnya.
2. Hasil karya saya ini bukan saduran/terjemahan melainkan merupakan gagasan, rumusan, dan hasil pelaksanaan penelitian dan implementasi saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan pembimbing akademik dan narasumber penelitian.
3. Hasil karya saya ini merupakan hasil revisi terakhir setelah diujikan yang telah diketahui dan di setujui oleh pembimbing.
4. Dalam karya saya ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali yang digunakan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari terbukti ada penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya saya ini, serta sanksi lain yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Ahmad Dahlan.

Yogyakarta, 28 Mei 2025
Yang Menyatakan



(Putri Andriyani)

Pernyataan Persetujuan Akses

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Putri Andriyani
NIM : 1800016032
Email : putri1800016032@webmail.uad.ac.id
Program Studi : Sistem Informasi
Fakultas : Sains dan Teknologi Terapan
Judul Skripsi : Rencana Perbaikan Indeks SPBE Pada Tingkat Kematangan Kapabilitas Proses di Pemkab Purworejo

Dengan ini saya menyerahkan hak sepenuhnya kepada Perpustakaan Universitas Ahmad Dahlan untuk menyimpan, mengatur akses serta melakukan pengelolaan terhadap karya saya ini dengan mengacu pada ketentuan akses tugas akhir elektronik sebagai berikut

Saya (~~mengijinkan~~/~~tidak mengijinkan~~) karya tersebut diunggah ke dalam Repository Perpustakaan Universitas Ahmad Dahlan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

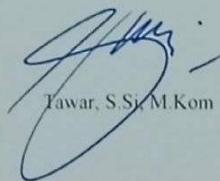
Yogyakarta, 28 Mei 2025



Putri Andriyani

Mengetahui

Pembimbing



Tawar, S.Si, M.Kom

Motto

“Setelah kesulitan pasti datang kemudahan. Mengajarkan untuk tetap bersabar tetap optimis dalam menghadapi tantangan atau cobaan hidup.”

(QS Al-Insyirah: 94:6)

Persembahan

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kepada Allah SWT, karena campur tangan dari NYA sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Pada kesempatan ini saya sampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan segala nikmat dan karunia-Nya sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini
2. Kedua orang tua saya tersayang, Bapak Sulaiman dan Ibu Mujiyem, terima kasih atas segala doa yang selalu diberikan di setiap sujud, nasehat, serta kesabaran dalam mendorong saya untuk menyelesaikan skripsi, dan terima kasih selalu menemani saat suka maupun duka.
3. Kakak saya Endah Lestari terima kasih sudah jadi kakak yang baik yang bisa jadi contoh buat adiknya dan sabar menjadi tempat keluh kesah. Terima kasih juga atas kebahagiaan yang diberikan selama ini.
4. Keponakan saya Qurrota'ayun Hasanah terima kasih sudah memberikan semangat dan kebahagiaan, yang setiap hari selalu menelepon

Kata Pengantar

Bismillahirrahmaanirrahiim,

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarokatuh

Segala puji bagi Allah swt, Tuhan semesta alam yang telah memberi rahmat dan hidayah kepada hambaNya lan penulis dapat menyelesaikan Laporan Tugas Akhir (Skripsi) ini.

Penulis menyadari bahwa keberhasilan dalam menyelesaikan laporan ini berkat bantuan, bimbingan, dan motivasi dari berbagai pihak, kendala tersebut dapat dilalui. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis menghaturkan terima kasih dan penghargaan kepada :

1. Prof. Dr. Muchlas, M.T., selaku Rektor Universitas Ahmad Dahlan,
2. Dr. H. Yudi Ari Adi, S.Si., M.Si. selaku Dekan Fakultas Sains dan Teknologi Terapan Universitas Ahmad Dahlan,
3. Ibu Sri Handyaningsih, S.T., M.T. selaku Kepala Program Studi Sistem Informasi Universitas Ahmad Dahlan,
4. Bapak Farid Suryanto, S.Pd., M.T. selaku Dosen Pembimbing Akademik
5. Bapak Tawar, S.Si., M.Kom. selaku Dosen Pembimbing Skripsi
6. Seluruh dosen program studi Sistem Informasi Universitas Ahmad Dahlan yang telah memberikan ilmu dan bimbingannya selama perkuliahan

7. Orang tua, kakak dan juga keponakan saya yang selalu memberikan perhatian, doa, kasih sayang serta dukungan kepada penulis untuk menyelesaikan pendidikan dan skripsi
8. Salsabiella Ramadhana, Fadila Rubiyanti Wibowo, Ina Nur Astuti, Merlina, Friska Exaktiningtyas, Dian Anita, safriandy, Abiyoso Dimas Ramadhan. Terima kasih sudah menjadi sahabat penulis dari awal kuliah
9. Mia Asriyani Hasanah, Yuli Asmiyati, Hani Ayuningtyas, Nilan Rahesti, Weni Novita Sari. Terimakasih sudah menjadi saudara seperjuangan penulis
10. Renvil Nanda Aulia Putri, Marissa Marvillianti. Sahabat masa kecil penulis yang selalu ada sampai sekarang, terima kasih buat semuanya

Yogyakarta, 28 Mei 2025

Putri Andriyani

Daftar Isi

Halaman Judul	i
Halaman Pengesahan	ii
Pernyataan Tidak Plagiat	iii
Pernyataan Persetujuan Akses	iv
Motto	v
Persembahan.....	vii
Kata Pengantar.....	vii
Daftar Isi	ix
Daftar Gambar	xii
Daftar Tabel.....	xiii
Abstrak	xiii
Bab 1 Pendahuluan	1
10.1 Latar Belakang.....	1
10.2 Identifikasi Masalah	6
10.3 Ruang Lingkup.....	7
10.4 Rumusan Masalah	8

10.5	Tujuan Penelitian	8
10.6	Manfaat Penelitian.....	8
2.1	Kajian Penelitian Terdahulu	10
2.2	Landasan Teori.....	14
2.2.1	Konsep <i>E-government</i>	14
2.2.2	Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE)	19
2.2.3	Evaluasi SPBE.....	22
3.2.4	Kriteria Tingkat Kematangan	24
2.2.5	Predikat Penilaian SPBE.....	25
2.2.6	Aspek Domain SPBE.....	26
2.2.7	Tingkat Kematangan Kapabilitas Fungsi SPBE	27
2.2.8	Permasalahan Umum SPBE	28
Bab 3	Metodologi	30
3.1	Subjek Penelitian.....	30
3.2	Metode Pengumpulan Data	31
3.2.1	Studi Literatur	31
3.2.2	Observasi	31
3.2.3	Wawancara	32

3.2.3 Kuesioner	34
3.3 Tahapan Penelitian	34
3.3.1 Kajian Pustaka	37
3.3.2 Penyusunan Instrumen Pengukuran.....	37
3.3.3 Analisis Data	37
Bab 4 Hasil dan Pembahasan	39
4.1.1 Lokasi Penelitian	39
4.1.2 Analisis Data	41
4.1.3 Resume Score.....	56
4.1.4 Rekomendasi Perbaikan	56
Bab 5 Penutup	60
5.1.1 Kesimpulan	60
5.1.1 Saran	61
Daftar Acuan.....	62
Lampiran	65

Daftar Gambar

	Halaman
Gambar 2.1. Struktur Penilaian SPBE	21
Gambar 3.1. Tahapan Penelitian	35
Gambar 4.1 Kantor Pemerintahan Purworejo	39
Gambar 4.2 Struktur organisasi pemkab Purworejo	40

Daftar Tabel

	Halaman
Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu	13
Tabel 2.2. Predikat Penilaian SPBE	25
Tabel 2.3a. Aspek Domain	26
Tabel 2.3b. Aspek Domain	27
Tabel 2.3c. Aspek Domain	27
Tabel 2.4. Karakteristik Tingkat Kematangan kapabilitas SPBE	28
Tabel 3.1. Pedoman wawancara	33
Tabel 3.2. Instrumen kuesioner penilaian	34
Tabel 4.1. Demografi responden kuesioner	40
Tabel 4.2. Kriteria hasil penilaian	42
Tabel 4.3. Hasil nilai setiap indikator kebijakan internal tata kelola SPBE	42
Tabel 4.4. Hasil nilai setiap indikator kebijakan internal layanan SPBE	44
Tabel 4.5. Hasil nilai setiap indikator kelembagaan	46
Tabel 4.6. Hasil nilai setiap indikator strategi dan perencanaan	48
Tabel 4.7. Hasil nilai setiap indikator teknologi informasi dan komunikasi	50
Tabel 4.8. Hasil nilai setiap indikator layanan administrasi pemerintahan	52
Tabel 4.9. Hasil nilai setiap indikator layanan publik berbasis elektronik	54
Tabel 5.0. Resume score setiap aspek	56

Rencana Perbaikan Indeks SPBE Pada Tingkat Kematangan Kapabilitas Proses di Pemkab Purworejo

SPBE Index Improvement Plan At The Procees Capability Maturity Level In Purworejo Regency Government

Abstrak

Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk melaksanakan prosedur Teknologi informasi dan komunikasi harus digunakan oleh pemerintah untuk melaksanakan fungsinya saat ini. Kurangnya prosedur untuk mengevaluasi penggunaan teknologi informasi dan komunikasi, khususnya di tingkat pemerintah daerah, menjadi salah satu masalah dalam penerapannya. Dalam penelitian ini, kematangan sistem pemerintahan berbasis elektronik dikaji. Tingkat kematangan berdasarkan kemampuan teknis ditentukan dengan menggunakan model kematangan e-government. Empat sektor, delapan komponen, dan empat puluh tujuh indikator sistem pemerintahan berbasis elektronik menjadi dasar evaluasi. Pemerintah Kabupaten Purworejo telah mencermatinya.

Analisis pustaka digunakan dalam penelitian ini. Studi pustaka merupakan salah satu bentuk penelitian yang mengumpulkan, meneliti, dan mensintesis bahan-bahan tekstual dari berbagai sumber. Tujuan utama penelitian ini adalah menggunakan Indeks Evaluasi SPBE untuk mengumpulkan data mengenai pelaksanaan SPBE di Kabupaten Purworejo. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, kuesioner, dan observasi. Kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan data sebelumnya dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa aspek kebijakan internal dan tata kelola SPBE (79%), kebijakan internal layanan SPBE (52%), kelembagaan (50%), strategi dan perencanaan (58%), teknologi informasi dan komunikasi (54%), layanan administrasi pemerintah berbasis elektronik (56%), dan layanan publik berbasis elektronik (59%). Dengan demikian, secara keseluruhan, indeks SPBE Pemkab Purworejo berada pada kategori cukup. Adapun beberapa rekomendasi perbaikan yang bisa dilaksanakan yaitu perbaikan pada kualitas sumber daya manusia (SDM), perbaikan kualitas *website* yang terintegrasi dengan *SPBE*, dan perbaikan infrastruktur.

Kata Kunci : Penilaian, Indeks SPBE, Kapabilitas, Layanan, Pemkab

Bab 1

Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Organisasi dan lembaga pemerintah dan non-pemerintah perlu menggunakan teknologi informasi (TI) untuk membuat pekerjaan mereka lebih efisien dan efektif. Untuk mencapai hal tersebut diperlukan pengelolaan TI yang baik dan tepat. TI harus dikelola dengan baik agar tata kelola perusahaan berhasil. Tata Kelola Teknologi Informasi (IT Governance) merupakan suatu komponen yang koheren pada suatu organisasi atau lembaga yang menitikberatkan pada manajemen kinerja dan keseluruhan risiko pemanfaatan teknologi informasi yang terkait dengan proses dan aktivitas bisnis sehingga dapat dikendalikan dengan baik (Pradnya et al., 2020).

Pemerintah didorong untuk melakukan perbaikan internal dan eksternal, terutama berkenaan dengan penerapan e-government, karena perluasan program pemerintah dalam penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Di bidang pendidikan, TIK sangat penting dalam mencapai tujuan dan visi suatu organisasi (Bouty et al., 2019).

TIK merupakan infrastruktur pembelajaran yang penting di mana bahan ajar tersedia secara digital. Hal ini memungkinkan untuk mengatur proses pembelajaran yang tidak tergantung pada waktu dan tempat. Pemerintah kabupaten mengatakan

TIK memiliki nilai strategis dalam meningkatkan daya saing negara. Oleh karena itu, peningkatan penguasaan TIK menjadi hal yang penting. Untuk meningkatkan penguasaan TIK, masyarakat perlu meningkatkan kesadaran tentang bagaimana TIK dapat dimanfaatkan secara produktif di segala bidang kehidupan.

Pemerintah menggunakan teknologi yang berkembang pesat. E-government adalah sebutan untuk sistem pemerintahan. Istilah "e-government" mengacu pada penggunaan TIK oleh pemerintah bersamaan dengan perubahan organisasi untuk meningkatkan operasi dan struktur pemerintahan (Twizeyimana & Andersson, 2019).

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik atau yang disingkat SPBE merupakan lembaga pemerintah yang memanfaatkan teknologi untuk memberikan layanan kepada masyarakat. Yuhefizar mengklaim SPBE memiliki sejumlah keunggulan, antara lain menyediakan informasi dan layanan kepada masyarakat, memudahkan pelaku usaha di lingkungan bisnis, mendorong kolaborasi antarpemerintah terkait, meningkatkan efektivitas lembaga pemerintah, dan memungkinkan pengelolaan lembaga yang efektif sesuai dengan kewenangannya (Yuhefizar et al., 2019).

Tingkat pelaksanaan SPBE di instansi pemerintah harus dinilai secara menyeluruh agar dapat memenuhi target pelaksanaan. Penetapan Indeks SPBE merupakan tujuan dari evaluasi pelaksanaan SPBE. Tingkat kematangan SPBE di setiap instansi pemerintah dapat direpresentasikan secara visual melalui indikator ini. (Pratiwi et al., 2020). Tingkat kematangan dapat diukur dari beberapa hal yaitu

teknologi, operasional organisasi, kemampuan sumber daya, serta proses dari organisasi itu sendiri (Bouty et al., 2019).

Pelaksanaan evaluasi SPBE ini menggunakan versi lama yang mana untuk menilai sistennya apakah layak untuk digunakan kedepannya di lingkungan pemerintah. Sistem di daerah ini belum menyeluruh dan tidak semua pemerintah provinsi berpartisipasi dalam evaluasi SPBE yang dilakukan oleh KemPemb, direktur SPBE di Indonesia, melalui perluasan SPBE. Kerangka kerja yang menurunkan tingkat penerapan SPBE dikenal sebagai tingkat kematangan SPBE. Domain adalah area dimana kegiatan SPBE dilaksanakan dan kemudian dievaluasi. SPBE diciptakan sebagai alat untuk menurunkan ambang batas kapabilitas proses dan layanan. Tingkat kematangan kapabilitas proses digunakan untuk menyesuaikan tingkat kematangan kebijakan, tata kelola, dan manajemen SPBE. Dengan menggunakan tingkat kematangan kapabilitas layanan, tingkat kapabilitas SPBE disesuaikan. (Altha, 2022).

Tahun	Indeks	Skor Indeks
2021	2,34	46%
2022	2,80	56%
2023	2,79	55%

Meskipun indeks diatas berada di atas rata-rata nasional, namun nilai di Provinsi Jawa Tengah masih dalam kategori cukup. SPBE di Jawa Tengah memiliki nilai provinsi tertinggi di Indonesia. Indeks SPBE kami berada pada angka 3,68. Harapan kedepannya saat Menteri PANRB harus menerapkan SPBE pada tahun 2020 (Pemb Purworejo, 2023). Pemerintah perlu memberikan bantuan melalui perizinan, percepatan, dan pelayanannya. Diharapkan e-government akan

membantu pemerintah dalam memberikan layanan dan memperkuat hubungannya dengan masyarakat, sektor swasta, dan lembaga pemerintah lainnya. Penerapan e-government di Indonesia diatur dalam Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)(Perpres, 2018). Padahal SPBE bisa dipergunakan untuk mengatasi permasalahan yang terjadi pada 8 aspek pemkab yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Dengan indeks SPBE yang baik diharapkan 8 aspek tersebut bisa dipenuhi dengan baik pula.

Permasalahan pertama adalah terkait aspek pelayanan publik di Indonesia masih menjadi tantangan besar dalam mewujudkan pemerintahan yang baik. Beberapa permasalahan umum yang sering ditemui antara lain adalah birokrasi yang berbelit-belit, prosedur yang rumit, dan waktu pelayanan yang lama. Selain itu, kurangnya transparansi dalam proses pengambilan keputusan, serta rendahnya kualitas sumber daya manusia (SDM) aparatur juga menjadi faktor penghambat (Sutedi 2024). Akibatnya, masyarakat seringkali merasa tidak puas dengan pelayanan yang diberikan oleh pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah.

Permasalah selanjutnya adalah terkait pembangunan infrastruktur teknologi di tingkat kabupaten yang terkadang masih memiliki beberapa kendala. Salah satu kendala utama adalah keterbatasan anggaran yang seringkali menghambat pengadaan perangkat keras dan lunak yang memadai. Selain itu, kurangnya sumber daya manusia yang kompeten di bidang teknologi informasi (TI) juga menjadi kendala signifikan. Tantangan lainnya adalah infrastruktur jaringan yang belum merata, terutama di daerah-daerah terpencil, sehingga menghambat aksesibilitas terhadap layanan berbasis teknologi (Bazarah dkk, 2021). Selain itu, kurangnya

kesadaran dan literasi digital di kalangan masyarakat dan aparat pemerintah juga menjadi faktor penghambat adopsi teknologi.

Permasalahan yang juga terlihat adalah Implementasi SPBE di Pemkab Purworejo yang ternyata masih menghadapi berbagai tantangan yang kompleks. Di sektor perekonomian, misalnya, kendala interoperabilitas sistem dan kurangnya standar data yang seragam menghambat integrasi data untuk pengambilan keputusan yang lebih baik (Dinar dkk, 2023). Dalam bidang pendidikan, permasalahan digital divide dan kurangnya infrastruktur teknologi di daerah terpencil menjadi penghalang akses terhadap layanan pendidikan berbasis teknologi (Mutia 2024). Di sektor kesehatan, kendala dalam integrasi data rekam medis dan sistem rujukan antar fasilitas kesehatan masih menjadi permasalahan (Dwianggoro & Nuriluta (2024). Sementara itu, di sektor keamanan, ancaman siber dan perlindungan data pribadi menjadi perhatian utama (Trianto dkk, 2024). Dalam konteks lingkungan hidup, pemanfaatan teknologi untuk pengelolaan data lingkungan belum optimal. Terakhir, dalam mendorong partisipasi masyarakat, tantangan utama adalah meningkatkan literasi digital dan kepercayaan masyarakat terhadap layanan pemerintah berbasis elektronik (Anugrah & Parwanti, 2024).

Pada penelitian ini akan dilakukan evaluasi dan penilaian indeks pada Pemkab Purworejo. Pemkab Purworejo memiliki fungsi sebagai pengelolaan informasi, pelayanan informasi, dan membantu integrasi aplikasi layanan publik. Pedoman evaluasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu SPBE. Evaluasi ini penting dilakukan untuk membuat sistem pemerintahan yang baik dalam melayani masyarakat dengan efektif.

Penerapan Manajemen Aset TIK, Manajemen Perubahan dan Manajemen Layanan SPBE dilaksanakan dengan tujuan untuk perbaikan berkelanjutan. Domain Manajemen SPBE akan menjadi fokus penelitian ini berdasarkan hasil identifikasi permasalahan. Perencanaan dan pelaksanaan SPBE secara keseluruhan dapat terhambat apabila terdapat kelemahan pada indeks Domain Pengelolaan SPBE. Oleh karena itu, tujuan dari studi ini adalah untuk menilai domain manajemen SPBE guna memastikan keberhasilan penerapannya di masa mendatang.

Dari permasalahan yang telah muncul, bahwa judul yang ditetapkan pada penelitian ini adalah “Evaluasi dan Penilaian Indeks SPBE Nasional pada Tingkat Kematangan Kapabilitas Proses dan Kapabilitas Layanan di Pemkab Purworejo”

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dilakukan sebelumnya dapat diidentifikasi masalah dalam penelitian ini diantaranya.

1. SPBE adalah hal yang penting karena bisa mengatasi permasalahan pada 8 aspek Pemkab namun indeks SPBE di Pemkab Purworejo masih rendah.
2. Implementasi SPBE di Pemkab Purworejo yang ternyata masih menghadapi berbagai tantangan yang kompleks
3. Evaluasi SPBE ini pada lingkungan pemerintah daerah Purworejo belum terlaksana dan berjalan dengan maksimal sehingga dapat mempengaruhi perkembangan SPBE pada lingkungan pemerintah daerah di Purworejo.

4. Penerapan evaluasi SPBE ini pada lingkungan pemerintah daerah belum terlaksana dan berjalan dengan maksimal.
5. Proses pengelolaan dan tata kelola SPBE di Pemerintah Kabupaten Purworejo belum terintegrasi dengan proses manajemen lainnya sehingga menyebabkan kinerja organisasi menurun.

1.3 Ruang Lingkup

Ruang Lingkup dalam penelitian ini diantaranya yaitu.

1. Penelitian dilakukan di Pemkab Purworejo.
2. Evaluasi dan penilaian indeks SPBE nasional hanya dilakukan pada tingkat kematangan kapabilitas proses dan kapabilitas layanan.
3. Prioritas perbaikan SPBE akan dilaksanakan berdasarkan rekomendasi Pemkab Purworejo.

1.4 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini diantaranya yaitu.

1. Bagaimana penilaian indeks SPBE pada Pemkab Purworejo?
2. Bagaimana upaya dalam meningkatkan indeks SPBE yang dilakukan pada layanan Pemkab Purworejo?

1.5 Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai penelitian ini adalah:

1. Menjelaskan dan mendeskripsikan hasil evaluasi dan penilaian indeks SPBE nasional hanya dilakukan pada tingkat kematangan kapabilitas proses dan kapabilitas layanan Pemkab Purworejo.
2. Menjelaskan dan mendeskripsikan upaya dalam meningkatkan indeks SPBE yang dilakukan pada tingkat kematangan kapabilitas proses dan kapabilitas layanan Pemkab Purworejo.
3. Menjelaskan dan mendeskripsikan faktor yang berpengaruh terhadap tingkat partisipasi masyarakat dalam menggunakan *e-government* di Purworejo.

1.6 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang diharapkan dalam penelitian ini yaitu.

1. Memberikan rekomendasi melalui evaluasi dan penilaian indeks SPBE yang dilakukan pada tingkat kematangan informasi pada layanan Pemkab Purworejo serta membantu dalam memperbaiki keamanan informasi pada instansi.
2. Memberikan solusi dan masukan pada pengelola keamanan informasi Dinas Pemkab Purworejo yang dapat digunakan untuk perbaikan keamanan informasi dalam mendukung peningkatan kualitas tata kelola keamanan informasi dari Pemkab.
3. Penyediaan informasi tentang sistem administrasi yang didukung secara elektronik. Pengembangan nilai tingkat kematangan SPBE, yang dapat menjadi dasar untuk studi evaluasi SPBE di masa mendatang.
4. Menjadi referensi pada peneliti selanjutnya mengenai evaluasi SPBE

Bab 2

Kajian Teori

2.1 Kajian Penelitian Terdahulu

Pertama, Penelitian dengan judul “Analisis dan evaluasi tingkat kematangan *E-government* pada *Information Architecture* menggunakan *Framework Cobit 5*” menjelaskan tentang Strategi penerapan e-government pada Pemerintah Daerah Kota Padang dengan menganalisis dan menilai tingkat kematangannya. Penelitian tentang evaluasi: Kerangka kerja Cobit 5 digunakan untuk menganalisis dan menilai tingkat kematangan E-Government dalam arsitektur informasi. Tingkat kemampuan dievaluasi pada kondisi aktual dan kondisi yang diharapkan, kemudian dilakukan pemetaan instrumen untuk memperoleh nilai indeks pada setiap domain, aspek, dan indikator. Penelitian ini memperoleh nilai menggunakan kapabilitas dan level kapabilitas yang diharapkan pada Cobit 5. Tingkat kematangan rata-rata adalah 3,22 yang termasuk dalam kategori proses pendirian (Purnama,2020)

Kedua, Penelitian dengan judul “Evaluasi Tingkat Kematangan SPBE Disperindag Kabupaten Banjar menggunakan CMMI Dev. Versi 1.3” Penelitian ini menjelaskan tentang evaluasi untuk mengetahui tingkat kinerja e-government

Kabupaten Banjar yang diimplementasikan dengan menggunakan panduan metode CMM/CMMI. Responden mengisi kuesioner untuk menghitung pengolahan data indeks domain layanan SPBE. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kematangan SPBE Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Banjar berada pada level 1 yang artinya pelayanan SPBE masih menggunakan informasi satu arah dan pengelolaan pelayanan SPBE dilakukan secara Proses Tereksekusi (Saputra et al., 2020).

Ketiga, Penelitian dengan judul “Evaluasi Penerapan *E-government* di Pemerintah Kabupaten Sumbawa Besar menggunakan kerangka kerja Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)” penelitian tentang tingkat kematangan Pelayanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik; Penilaian difokuskan pada Aspek 6 dan mengikuti pedoman evaluasi Peraturan MENPAN No. 5 Tahun 2018. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumbawa yang bertugas melaksanakan penelitian ini melakukan survei melalui wawancara. Nilai indeks aspek 6 sebesar 2,8 berisi informasi tentang indikator 25 yang mempunyai skor level 2 artinya cukup, dan indikator 26 sampai dengan 31 yang mempunyai skor level 3 artinya baik. Perbedaan antara kondisi layanan saat ini dan target yang diharapkan adalah 2,20 untuk setiap dua (Pratiwi et al., 2020).

Keempat, Penelitian dengan judul “Evaluasi Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Pemerintah Kabupaten Lumajang Menggunakan

Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pedoman Evaluasi SPBE”. Penelitian yang dilakukan yaitu evaluasi regulasi MENPAN-RB tahun 2018. Evaluasi Sistem Informasi Pemerintah Kabupaten Lumajang untuk mengetahui kematangan implementasi SPBE. Studi ini hanya menggunakan CMM/CMMI sebagai konsep penilaian. (Firdaus,2018).

Kelima, Penelitian dengan judul “Evaluasi of E-Government Maturity Models in Sub-District Public Service in Indonesia Using the SPBE Framework” menjelaskan tentang evaluasi SPBE mengenai pelayanan publik di Kecamatan tertentu di Indonesia. Penerapan standar penilaian SPBE pada ranah 3 (Pelayanan SPBE) sesuai PERMENPAN Nomor 5 Tahun 2018 dan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2020. Penilaian dilakukan terhadap PATEN (Pelayanan Administrasi Kecamatan). Hasil kajian menunjukkan bahwa tata kelola pemerintahan masih belum optimal karena masih banyak kecamatan yang belum menerapkannya, dan pelayanan publik berbasis elektronik di kecamatan masih belum optimal karena masih banyak indikator yang belum terpenuhi (I Made Sukarsa et al., 2020).

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

KRITERIA	Kajian 1	Kajian 2	Kajian 3	Kajian 4	Kajian 5
Peneliti	Sumijan, Pradani Ayu Widya P.(2020)	M. Rizeki Yuda S., Wing Wahyu W.,Henderi (2020)	Henry Dwi P., Widhy H.N.P., Admaja Dwi H.(2020)	Muhammad Rifky F.(2019)	I Made Sukarsa, Ida Bagus Ananda P, Anak Agung Ketut A.C., Kadek Suar W.(2020)
Judul	Analisis dan evaluasi tingkat kematangan <i>E-government</i> pada Information Architecture menggunakan Framework Cobit 5	Evaluasi Tingkat Kematangan SPBE Disperindag Kabupaten Banjar menggunakan CMMI Dev. Versi 1.3	Evaluasi Penerapan <i>E-government</i> di Pemerintah Kabupaten Sumbawa Besar menggunakan kerangka kerja Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Evaluasi Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kabupaten Lumajang Menggunakan Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pedoman Evaluasi SPBE	Evaluasi of E-Government Maturity Models in Sub-District Public Service in Indonesia Using the SPBE Framework
GAP RESEARCH	Evaluasi Information Architecture pada setiap organisasi perangkat daerah Kota Padang menggunakan kerangka kerja Cpbit 5 dan menghasilkan nilai rata-rata tingkat tata kelola	Penelitian menggunakan domain 3 (layanan SPBE) pada PERMENPAN tahun 2018 sebagai model evaluasi	Evaluasi SPBE menggunakan PERMENPAN No. 5 Tahun 2018, dengan focus penilaian hanya pada aspek 6 (layanan administrasi pemerintahan) Nilai Indeks Aspek 6 senilai 2.70	Evaluasi SPBE menggunakan pedoman dari PERMENPAN Nomor 5 Tahun 2018	Proses evaluasi hanya berfokus pada Domain 2 (Tata kelola) dan Domain 3 (Layanan SPBE) PERMENPAN No. 59 Tahun 2020
	Dalam penelitian tersebut hanya mengukur <i>E-government</i> pada Information Architecture, sedangkan dalam	Dalam penelitian tersebut fokus yang dilakukan hanya terhadap evaluasinya, sedangkan penelitian ini yaitu Penilaian	Dalam penelitian tersebut, hanya pada aspek 6 (layanan administrasi pemerintahan), sedangkan dalam penelitian ini	Dalam penelitian tersebut hanya berfokus dalam evaluasi implementasi, sedangkan dalam penelitian ini yaitu mengukur pula Tingkat	Dalam penelitian tersebut evaluasi hanya berfokus pada Domain 2, sedangkan dalam penelitian ini yaitu dengan pada 3

Kelebihan	penelitian ini evaluasinya terhadap Pengukuran tingkat kematangan dijalankan pada kapabilitas fungsi teknis menggunakan <i>e-government maturity</i> model dan melakukan penilaian pada 3 domain, 7 aspek dan 35 indikator yang terdapat dalam sistem pemerintahan berbasis elektronik.	kematangan dengan Indeks SPBE secara Nasional	penilaiannya pada 3 domain, 7 aspek dan 35 indikator	Kematangan Kapabilitas Proses dan Kapabilitas Layanan.	domain, 7 aspek dan 35 indikator
-----------	---	---	--	--	----------------------------------

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Konsep *E-government*

Pemerintahan elektronik, juga dikenal sebagai "e-government", mengacu pada penggunaan aplikasi TIK untuk memberikan berbagai layanan pemerintahan. E-government telah menciptakan peluang baru bagi pemerintah untuk menyediakan informasi dan membantu warga negara dengan meningkatkan efisiensi, kualitas, dan keandalan (Malodia et al., 2021). *E-government* menurut (Burlacu et al., 2021) merupakan Penggunaan teknologi informasi untuk menyediakan layanan

administratif, bertukar informasi, berkomunikasi, mengintegrasikan sistem elektronik yang berbeda dan menyediakan layanan otonom antara pemerintah dan warga negara (G2C), antara pemerintah dan bisnis (G2B), antara lembaga pemerintah (G2G) dan untuk operasi dan interaksi staf administratif melalui infrastruktur administratif. Seperti yang dilaporkan oleh Harvard School of Government, infrastruktur teknologi informasi yang memadai merupakan 50% penentu keberhasilan penerapan konsep e-government.

E-government menurut (Esselimani et al., 2021) memiliki tiga kegiatan utama yaitu (1) integrasi layanan publik berkualitas tinggi, (2) menyediakan manajemen hubungan yang efektif dengan warga negara, dan (3) mendukung tujuan pembangunan warga negara dan masyarakat sipil di tingkat ekonomi dan sosial secara lokal, nasional, dan internasional. Kajian dan riset Harvard JFK School of Government dalam Indrajit (2006), mengatakan bahwa ada tiga elemen yang dibutuhkan untuk keberhasilan penerapan konsep digitalisasi di sektor publik. Pertama, Pemerintah harus menyediakan komponen utama, dukungan. Beberapa politisi dan pejabat memiliki keinginan untuk menggunakan TIK untuk mengimplementasikan ide-ide layanan, daripada sekadar mengikuti tren global atau menolak upaya e-government. Pengembangan dan perluasan layanan digital ini akan sulit dilakukan tanpa kemauan politik. Dukungan dapat diberikan dengan menyepakati kerangka kerja e-government, memberikan prioritas utama pada pengembangan e-government sebagai salah satu rahasia keberhasilan suatu negara

dalam memenuhi visi dan misinya, dan mendedikasikan sumber daya (uang, waktu, informasi, energi, sumber daya manusia, dll.). Distribusi sumber daya (manusia, keuangan, personil, waktu, informasi, dan lain-lain) di semua tingkat pemerintahan untuk mengembangkan ide ini secara lintas sektoral Pembentukan infrastruktur pendukung, seperti hukum dan peraturan, untuk mendorong pertumbuhan e-government, bahkan untuk mendorong pertumbuhan e-government.) di semua tingkat pemerintahan untuk mengembangkan ide ini secara lintas sektoral; Pembentukan suprastruktur dan infrastruktur pendukung, seperti hukum dan kelembagaan, untuk mendorong pertumbuhan e-government; secara merata, terus menerus, dan konsisten memperkenalkan ide e-government kepada masyarakat secara umum dan birokrat secara khusus(Pratiwi *et al.*, 2020).

Kedua, Kapasitas: mengacu pada unsur kemampuan atau keberdayaan pemerintah pada suatu waktu tertentu dalam mengimplementasikan inisiatif e-government yang melibatkan setidaknya tiga (3) pernyataan. Hal ini menyoroti poin-poin berikut: tenaga kerja harian yang membantu dalam mengimplementasikan berbagai inisiatif e-government, khususnya yang terkait dengan tenaga kerja keuangan harian; infrastruktur teknologi informasi tenaga kerja harian yang mudah digunakan, karena fasilitas ini menyumbang 50% keberhasilan implementasi konsep; dan ketersediaan sumber daya manusia dengan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan. Elemen ketiga ini penting untuk diperhatikan jika e-government ingin berhasil.

Ketiga, nilai: elemen kedua dan ketiga adalah dua aspek yang diamati dalam tindakan pemerintah ketika berhubungan dengan perusahaan dari sisi penawaran. (Astuti *et al.*, 2021). Ada sejumlah inisiatif e-government yang tidak akan digunakan jika tidak ada organisasi yang terpengaruh oleh konsep tersebut. Dalam hal ini, terbukti bahwa pemerintah sendiri tidak mendapatkan manfaat dari keberadaan e-government karena gagal menginformasikan kepada masyarakat yang membutuhkan (demand side). Untuk memberikan (nilai) manfaat, pemerintah harus berhati-hati dalam mengembangkan aplikasi atau menyediakan layanan e-government yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Tantangan untuk menyediakan layanan e-government yang memenuhi kebutuhan masyarakat umum akan menyulitkan pemerintah itu sendiri yang akan terhambat dalam bisnis pengembangan e-government (Syahrini Qotrunnisa, 2021).

Dua belas komponen yang disebutkan sebelumnya akan digabungkan untuk menciptakan jaringan e-government; Ini adalah bagian penting dari penerapan e-government. Apabila ketiga unsur tersebut tidak diperhatikan dalam pengembangan gagasan e-government, maka implementasinya akan sulit. Heeks (2001) mengatakan bahwa e-government harus siap dengan 6 (enam) pertanyaan untuk mencapai e-governance yang sukses (tata kelola bersamis digital). Pertama, apakah sistem infrastruktur data masih ada? Di banyak negara, diakui bahwa kualitas dan integritas data sangat penting, oleh karena itu diperlukan infrastruktur untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas data. Kedua, apakah infrastruktur hukum

sudah lengkap? Harus ada kerangka hukum yang terpisah untuk melindungi hak-hak digital, serta untuk melindungi privasi, keamanan data, dan pertukaran informasi antara individu, bisnis, dan lembaga pemerintah;

Ketiga, apakah infrastruktur kelembagaan sudah ada? E-government hanya dapat berkembang jika ada lembaga yang berdedikasi untuk mewujudkannya; di banyak negara, tidak ada organisasi yang mendukung, mengkoordinasikan, dan mengawasi pelaksanaan e-government.

Keempat, apakah infrastruktur SDM sudah lengkap? Pemerintah harus mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap sektor publik untuk mengimplementasikan e-government.

Banyak negara memiliki banyak kesenjangan dan kurangnya kesiapan terkait e-government. Kesenjangan ini mencakup keengganan terhadap perubahan, kurangnya orientasi pelanggan, keengganan terhadap kebocoran data, dan lain-lain.

Kelima, apakah infrastruktur teknologi masih siap digunakan? Banyak negara masih kesulitan menyediakan infrastruktur teknologi, terutama yang berkaitan dengan e-government; Keenam, apakah perencanaan dan pelaksanaan strategis sudah selesai? Para pemimpin harus memiliki visi yang memasukkan e-government ke dalam agenda dan operasi mereka untuk menurunkan biaya operasional.

2.2.2 Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE)

Singkatan dari “Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik” adalah SPBE. SPBE merupakan lembaga pemerintah yang memberikan pelayanan kepada pengguna SPBE dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Hal ini sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden Nomor. 95 Tahun 2020 tentang sistem pemerintahan elektronik. Tujuan SPBE adalah menyelenggarakan pelayanan pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel, serta pelayanan publik yang bermutu dan dapat diandalkan. Selain itu, penerapan dan pengelolaan sistem pemerintahan nasional berbasis elektronik sangat penting untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitasnya (Kementrian panrb, 2020).

Melalui penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (EGO) atau yang dikenal juga dengan E-Government, pemerintah memiliki kemampuan untuk memodernisasi infrastruktur nasional berkat teknologi informasi dan komunikasi (TIK). SPBE merupakan pemanfaatan TIK oleh pemerintah untuk memberikan pelayanan kepada instansi pemerintah, infrastruktur nasional, dunia usaha, masyarakat umum, dan kelompok lainnya. SPBE memungkinkan Anda untuk mendorong dan mendukung praktik manajemen yang transparan, terlibat, inovatif, dan bertanggung jawab; meningkatkan kerjasama antar instansi pemerintah dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya untuk mencapai tujuan bersama; dan mengurangi korupsi, nepotisme, dan kolusi melalui penyelenggaraan pelayanan publik (Kementrian panrb, 2020).

Pemerintah menyoroti pentingnya SPBE dalam mendukung semua sektor pembangunan. Upaya untuk mendukung SPBE telah dilakukan oleh pemerintah dengan memberlakukan peraturan sektoral yang mengindikasikan perlunya sistem informasi, atau SPBE. Saat ini, pemerintah, organisasi, dan pemerintah kota di daerah telah berhasil mengimplementasikan SPBE secara mandiri sesuai dengan kemampuan yang dimiliki dan mencapai tingkat keragaman SPBE yang sangat tinggi di tingkat nasional. Instansi pusat dan pemerintah daerah menggunakan Rencana Induk SPBE Nasional sebagai pedoman dalam mencapai tujuan SPBE dan membangun sinergi SPBE sesuai ketentuan perundang-undangan antara pemerintah, departemen, dan pemerintah daerah. Rencana Induk SPBE Nasional menjabarkan kebijakan, strategi dan maksud di bidang pengelolaan jasa SPBE I, SDM. Hal ini dilakukan dalam rangka pencapaian sasaran strategis SPBE tahun 2018–2025 dan pembangunan infrastruktur nasional sebagaimana tertuang dalam RPJP Nasional tahun 2005–2025 serta Desain Besar Reformasi Birokrasi tahun 2010–2025 (Kementrian panrb, 2020)..

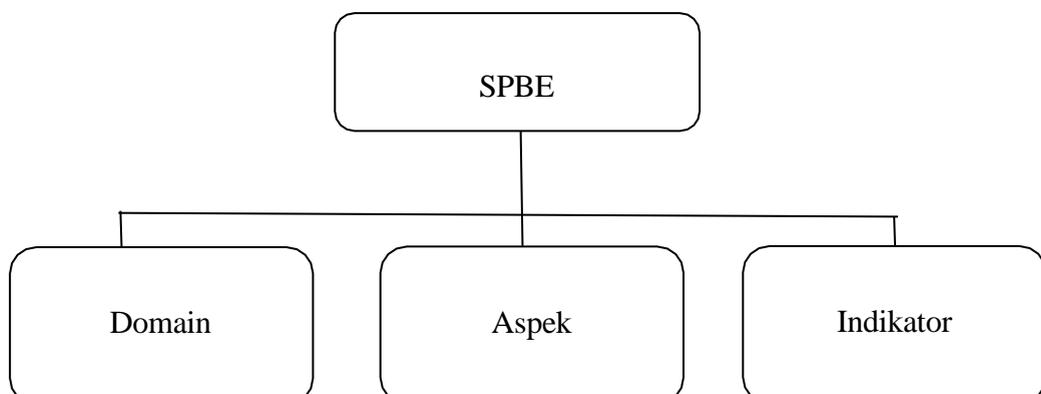
TIK sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Pengembangan TIK dapat meningkatkan sistem pemerintahan, yang pada gilirannya meningkatkan pelayanan publik. Pemerintahan berbasis elektronik (EBG), juga dikenal sebagai "e-government", adalah upaya pemerintah untuk menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan sistem pemerintahan dan membuat administrasi pemerintahan lebih efisien. Banyak kendala yang akan dipengaruhi

oleh penerapan e-government di suatu negara. Jika suatu negara tidak mampu mengakomodasi kendala-kendala tersebut, maka hal ini dapat menyebabkan kesulitan dalam penelitian. Berdasarkan perkembangan terkini, Pemerintah Indonesia telah mulai menerapkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik untuk meningkatkan pelayanan publik dan mempermudah pengolahan informasi dengan memanfaatkan kemajuan informasi dan teknologi. Untuk mempermudah pelaksanaan SPBE, khususnya di tingkat pemerintah daerah, maka ditetapkanlah Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang SPBE (Sumijan & Purnama, 2020).

Dalam menjabarkan visi dan misi yang dibuat, Pemerintah Indonesia berupaya keras untuk menciptakan sistem pemerintahan elektronik yang komprehensif dan efisien. Tujuan penerapan e-government adalah untuk meningkatkan pelayanan publik dengan menggabungkan prosedur bisnis sehingga.

Penilaian pada pelaksanaan SPBE dilakukan melalui struktur penilaian yang terdiri dari:

Gambar 2.1 Struktur Penilaian SPBE



Berdasarkan gambar 2.1 dapat diketahui bahwa SPBE memiliki kaitan yang meliputi domain, aspek, dan indikator. **Domain** merupakan area luas di mana SPBE diterapkan dan dinilai. Misalnya, domain ini bisa mencakup infrastruktur teknologi, manajemen data, atau layanan public. **Aspek** di dalam setiap domain, terdapat aspek-aspek spesifik yang menjadi fokus penilaian. Contohnya, dalam domain infrastruktur teknologi, aspek yang mungkin dinilai adalah ketersediaan jaringan, perangkat keras, dan perangkat lunak. Indikator adalah informasi yang lebih rinci dan spesifik yang digunakan untuk menilai setiap aspek penerapan SPBE yang dinilai. Ini bisa berupa ukuran kuantitatif atau kualitatif, seperti waktu respon sistem, tingkat kepuasan pengguna, atau frekuensi pemeliharaan sistem. (BPKRI, 2018).

2.2.3 Evaluasi SPBE

Penilaian SPBE merupakan proses penilaian penyelenggaraan SPBE pada instansi pemerintah untuk menentukan nilai indeks yang menunjukkan tingkat kematangan penyelenggaraan SPBE (Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018, 2018). Penilaian tingkat kematangan kapabilitas proses dan kapabilitas layanan merupakan dua konsep penilaian kematangan dalam SPBE (Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, 2020).

Kajian SPBE bertujuan untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan SPBE untuk kepentingan pusat dan daerah, meningkatkan mutu penyelenggaraan, dan menjamin mutu kajian penyelenggaraan SPBE untuk kepentingan daerah. Dalam rangka menjamin terselenggaranya pelatihan SPBE secara holistik dan terjaganya kesehatan peserta didik, maka dilakukan evaluasi dasar agar efektivitas pelatihan SPBE regional dan universitas tetap terjaga. Menteri PANRB menerima laporan SPBE tahun 2018, berdasarkan telaah Menteri PANRB Nomor 5 Tahun 2018, terdapat aspek dan 35 indikator perbaikan dari tiga hal. Anda akan heran bahwa mandat Presiden belum dilaksanakan sepenuhnya (Nabila, 2021).

Penerapan dan Pengembangan e-government secara legalistik disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Purworejo melalui penerapan Peraturan Bupati Purworejo No. 52 Tahun 2017. Aspek legal ini umumnya terkait dengan infrastruktur, anggaran, dan inovasi dalam pengembangan dan penerapan e-government (Fadhillah, 2023).

Badan Pusat dan Pemerintah Daerah melaksanakan proses tata kelola SPBE dengan berpedoman pada prinsip-prinsip manajemen yang ditetapkan dan terdokumentasi (perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi). Meskipun demikian, masing-masing unit organisasi menerapkan proses tata kelola SPBE sebagaimana diuraikan di atas, berdasarkan pada pemahaman, pengelolaan, dan pemantauan bersama. Dalam menjalankan proses tata kelola SPBE, pimpinan tidak

mempengaruhi atau menggambarkan keterpaduan antar unit organisasi. Meskipun kebijakan internal sebagai landasan proses tata kelola SPBE telah disahkan, namun implementasinya masih bersifat parsial atau sektoral, sehingga tidak mampu memitigasi dampak negatif dari proses tata kelola SPBE (Kemenpan, 2018). Tanggung jawab ini tidak hanya berlaku untuk DinPekab, tetapi juga berlaku untuk Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lainnya di Kabupaten Purworejo.

2.2.4 Kriteria Tingkat Kematangan

Kriteria tingkat kematangan terdiri dari lima tingkat yaitu rintisan, terkelola, terstandarisasi, terintegrasi dan terukur, serta optimum (Idris, 2018).

1. Karakteristik rintisan yaitu tidak terorganisasi dengan baik, tanpa pemantauan, proses tata kelola dilaksanakan tidak tentu (sewaktu-waktu), hasil tidak terprediksi dan tanpa pemantauan.
2. Karakteristik terkelola yaitu tata Kelola yang dilaksanakan dengan dasar manajemen dan standar tiap unit organisasi. Kebijakan internal telah dilegalisasi dengan pengaturan bersifat parsial.
3. Karakteristik terstandarisasi yaitu tata kelola dilaksanakan dengan standarisasi. Kebijkana internal mengatur standar proses tata kelola tiap unit organisasi.

4. Proses pengelolaan dilakukan secara terukur, artinya karakteristiknya terpadu dan terukur. Kebijakan internal menentukan bagaimana proses dan mekanisme pengukuran kinerja proses bekerja bersama..
5. Karakteristik terbaiknya adalah proses manajemen dilakukan dengan peningkatan kualitas secara berkelanjutan. Mekanisme evaluasi berkelanjutan diatur oleh kebijakan internal.

2.2.5 Predikat Penilaian SPBE

Predikat penilaian indeks SPBE diantaranya yaitu.

Tabel 2.2 Predikat Penilaian SPBE.

Nilai Indeks	Predikat
4.2 – 5.0	Memuaskan
3.5 - < 4.2	Sangat Baik
2.6 – < 3.5	Baik
1.8 - < 2.6	Cukup
< 1.8	Kurang

Ranah pelayanan terdiri atas dua bagian, yaitu pelayanan tata usaha negara dan predikat penilaian SPBE yang diatur dalam Peraturan Menteri PAN-RB Nomor. 59 Tahun 2020. Pelayanan publik secara elektronik yang mendapat predikat “cukup baik” dan “sangat baik”. Hasil perhitungan data yang dilakukan berupa nilai indeks dan predikat penilaian SPBE yang menentukan syarat penyelenggaraan SPBE di pemerintah daerah atau instansi pusat.

2.2.6 Aspek Domain SPBE

Sebuah domain terdiri satu atau beberapa aspek, dan sebuah aspek terdiri dari atau beberapaindikator yang bisa dilihat pada tabel 2.3a-2.3c..

Tabel 2.3a. Aspek Domain (Perwal 35, 2020)

Domain 1	Kebijakan Internal SPBE
Aspek 1	Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE
Indikator 1	Kebijakan Internal tim pengarah SPBE instansi Pemerintah
Indikator 2	Kebijakan Internal inovasi proses bisnis terintegrasi
Indikator 3	Kebijakan Internal rencana induk SPBE instansi Pemerintah
Indikator 4	Kebijakan Internal anggaran dan belanja TIK
Indikator 5	Kebijakan Internal pengoperasian pusat data
Indikator 6	Kebijakan Internal integrasi sistem aplikasi
Indikator 7	Kebijakan Internal penggunaan aplikasi umum berbagi pakai
Aspek 2	Kebijakan Internal layanan SPBE
Indikator 8	Kebijakan Internal layanan naskah dinas
Indikator 9	Kebijakan Internal layanan manajemen kepegawaian
Indikator 10	Kebijakan Internal layanan manajemen perencanaan dan penganggaran
Indikator 11	Kebijakan Internal layanan manajemen keuangan
Indikator 12	Kebijakan Internal layanan manajemen kinerja
Indikator 13	Kebijakan Internal layanan pengadaan
Indikator 14	Kebijakan Internal layanan pengaduan publik
Indikator 15	Kebijakan Internal layanan dokumentasi dan informasi hukum
Indikator 16	Kebijakan Internal layanan <i>whistle blowing system</i>
Indikator 17	Kebijakan Internal layanan publik instansi Pemerintah

Tabel 2.3b. Aspek Domain

Domain 2	Tata Kelola SPBE
Aspek 3	Kelembagaan
Indikator 18	Tim pengarah SPBE instansi Pemerintah
Indikator 19	Inovasi proses bisnis terintegrasi
Aspek 4	Strategi dan Perencanaan
Indikator 20	Rencana induk SPBE instansi Pemerintah
Indikator 21	Anggaran dan belanja TIK
Aspek 5	Teknologi Informasi dan Komunikasi
Indikator 22	Pengoperasian pusat data
Indikator 23	Integrasi sistem aplikasi
Indikator 24	Penggunaan aplikasi umum berbagi pakai
Domain 3	Layanan SPBE
Aspek 6	Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis

Tabel 2.3c. Aspek Domain

	Elektronik
Indikator 25	Layanan naskah dinas
Indikator 26	Layanan Manajemen Kepegawaian
Indikator 27	Layanan Manajemen Perencanaan
Indikator 28	Layanan Manajemen Penganggaran
Indikator 29	Layanan Manajemen Keuangan
Indikator 30	Layanan Manajemen Kinerja
Indikator 31	Layanan Pengadaan
Aspek 7	Layanan Publik Berbasis Elektronik
Indikator 32	Layanan pengaduan publik
Indikator 33	Layanan dokumentasi dan informasi hukum
Indikator 34	Layanan <i>whistle blowing system</i>
Indikator 35	Layanan publik instansi Pemerintah

2.2.7 Tingkat Kematangan Kapabilitas Fungsi SPBE

Tingkat kemampuan fungsional SPBE diterapkan pada domain layanan SPBE.

Tabel 3.2 di bawah menunjukkan karakteristik tingkat kematangan

Tabel 2.4. Karakteristik Tingkat Kematangan kapabilitas SPBE

Tingkat	Kriteria
1 – Informasi	Layanan SPBE diberikan dalam bentuk informasi satu arah
2 – Interaksi	Layanan SPBE diberikan dalam bentuk interaksi dua arah
3 – Transaksi	Layanan SPBE diberikan melalui pertukaran informasi dan layanan
4 – Kolaborasi	Layanan SPBE diberikan melalui integrasi dengan layanan SPBE lain
5 – Optimalisasi	Layanan SPBE dapat beradaptasi terhadap perubahan kebutuhan dilingkungan internal dan eksternal

2.2.8 Permasalahan Umum SPBE

Permasalahan umum SPBE adalah sebagai berikut:

- a. Domain kebijakan: berdasarkan prinsip ini, walaupun ada peningkatan penerapan kebijakan internal SPBE, hal tersebut dilakukan oleh mayoritas Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah. Sebelumnya, terdapat prosedur penerapan SPBE internal yang ketat dan diawasi oleh Instansi Pusat/Pemerintah Daerah. Akibatnya, penerapan tersebut tidak terlalu efektif atau sesuai untuk melaksanakan transformasi SPBE di seluruh unit kerja atau daerah (Hakim, 2018) .

- b. Domain tata kelola: Karena ketidakefisienan sebagai peredam ketidakselarasan pemanfaatan TIK dengan perencanaan anggarannya, seperti duplikasi pengadaan TIK karena tidak dikoordinasikan dan diatur dengan baik (Susilo, 2021).
- c. Domain layanan: Pengembangan dan implementasi sistem aplikasi tidak terkoordinasi sehingga tidak terintegrasi dan stabil. Salah satu temuan utama dalam implementasi SPBE Pemerintah Daerah adalah aplikasi yang tidak terkoordinasi dengan baik akan sulit digunakan oleh masyarakat umum (Susilo, 2021).

Bab 3

Metodologi

3.1 Subjek Penelitian

Subjek penelitian merupakan tempat variabel melekat. Subjek penelitian adalah tempat dimana data untuk variabel penelitian diperoleh (Supriyanto et al., 2021). Pada penelitian ini Topik pembahasannya adalah penilaian Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Nasional pada tingkat kematangan kapabilitas proses dan kapabilitas pelayanan di Pemerintah Kabupaten Purworejo. Penilaian ini dimaksudkan untuk memberikan manfaat dalam berbagai aspek, seperti memberikan informasi dan pelayanan kepada masyarakat, memberikan kemudahan bagi para pelaku bisnis dari kalangan dunia usaha, memperlancar kerja sama antar pemerintah dan instansi pemerintah terkait. Adapun narasumber pada penelitian ini adalah 2 pegawai pemkab yang terdiri dari staff bidang TIK dan Staff pelaksana pelayanan publik. Selain itu, juga akan diambil 20 orang secara acak terdiri dari warga Purworejo yang pernah menggunakan atau mengakses *website* pemerintah Purworejo.

3.2 Metode Pengumpulan Data

Adapun pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut:

3.2.1 Studi Literatur

Kegiatan studi literatur bertujuan untuk mengumpulkan data penelitian dan membahas kerangka teori yang digunakan (Astuti dkk., 2021). Daftar pustaka yang dijadikan dasar penelitian ini berupa jurnal akademik, panduan evaluasi SPBE dan karya tulis ilmiah penelitian terdahulu, serta dokumen dari Kantor Pemerintah Kabupaten Purworejo yang terkait dengan SPBE di Kabupaten Purworejo.

3.2.2 Observasi

Menurut Nasution (1988) dalam (Sugiyono, 2012), Dasar pengetahuan adalah kegunaan. Studi ini merupakan sumber pendapatan pasif. Manfaatnya meliputi pengembangan langsung proses manajemen dan tata kelola e-government di Kabupaten Purworejo. Yang menyatukan kami adalah dukungan perangkat keras dan perangkat lunak, kualitas koneksi internet, keandalan layanan publik, serta pemasangan dan dukungan perangkat. Oleh karena itu kami melakukan analisis dan evaluasi indeks SPBE nasional pada proses dan pelayanan terumbu karang Kabupaten Purworejo. Pemkab Purworejo memiliki fungsi sebagai pengelolaan informasi, pelayanan informasi, dan membantu integrasi aplikasi layanan publik.

Pedoman evaluasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu SPBE. Evaluasi ini penting dilakukan untuk membuat sistem pemerintahan yang baik dalam melayani masyarakat dengan efektif. Dari fenomena tersebut kemudian dapat dijadikan dasar untuk memperkuat penelitian.

3.2.3 Wawancara

Menurut (Sugiyono, 2012), Wawancara digunakan sebagai metode pengumpulan data ketika peneliti ingin melakukan penelitian pendahuluan untuk mengetahui masalah mana yang perlu diselidiki lebih lanjut. Wawancara dilakukan untuk mengumpulkan informasi dari berbagai sumber yang terlibat dalam proses manajemen dan pemerintahan Kabupaten Purworejo. Penelitian ini menggunakan dua orang pegawai pemerintah kabupaten sebagai narasumber, meliputi staf TIK dan penanggung jawab penyelenggaraan pelayanan publik. Selain itu, akan dipilih secara acak 20 orang warga Purworejo yang menggunakan SPBE. Panduan wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

Tabel 3.1. Pedoman Wawancara

No	Aspek	Deskripsi pertanyaan
1	Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE	Siapa yang bertanggung jawab tentang kebijakan tata kelola SPBE?
		Bagaimana monitoring pelaksanaan kebijakan internal tata kelola SPBE?
2	Kebijakan Internal Layanan SPBE	Bagaimana layanan SPBE dilaksanakan?
		Bagaimana Tingkat kematangan layanan SPBE di Pemkab Purworejo?
3	Kelembagaan	Bagaimana sistem manajemen pengawasan SPBE di Pemkab Purworejo?
		Layanan apa saja dalam penyelenggaraan SPBE ?
		Bagaimana lembaga terkait memastikan kepuasan pelanggan pengguna SPBE di Pemkab Purworejo?
4	Strategi dan Perencanaan	Faktor pendukung dan penghambat apa saja yang mempengaruhi layanan SPBE di Pemkab Purworejo?
		Apa yang menjadi kendala dalam penyelenggaraan SPBE ?
5	Teknologi Informasi dan Komunikasi	Apakah dari pihak Pemerintah Kota Purworejo atau dari pihak DisPemkab Purworejo menyediakan infrastruktur untuk mempermudah masyarakat dalam mengakses website/aplikasi?
		Bagaimana pelaksanaan maintenance aplikasi agar bisa tetap maksimal penggunaannya?
6	Layanan Administrasi Pemerintah Berbasis Elektronik	Apa sajakah manfaat yang didapat Pemkot Purworejo atas hadirnya SPBE?
		Bagaimana respon masyarakat terkait manfaat SPBE di Pemkab Purworejo?
		Apakah ada keluhan dari masyarakat terkait layanan administrasi berbasis SPBE?
7	Layanan Publik Berbasis Elektronik	Bagaimana kapabilitas layanan SPBE di Pemkab Purworejo?
		Bagaimana respon masyarakat terkait manfaat SPBE di Pemkab Purworejo?
		Apakah ada keluhan dari masyarakat terkait layanan administrasi berbasis SPBE?
		Bagaimana pihak terkait menanggapi respon atau keluhan dari masyarakat?

3.2.3 Kuesioner

Teknik pengumpulan data kuesioner adalah teknik pengumpulan data dengan cara melakukan penilaian melalui kuesioner yang dilakukan oleh pihak yang memiliki keahlian (Sugiyono, 2018). Teknik kuesioner dipergunakan mengetahui indeks SPBE Pemkab Purworejo. Adapun instrumen kuesioner dapat dilihat pada

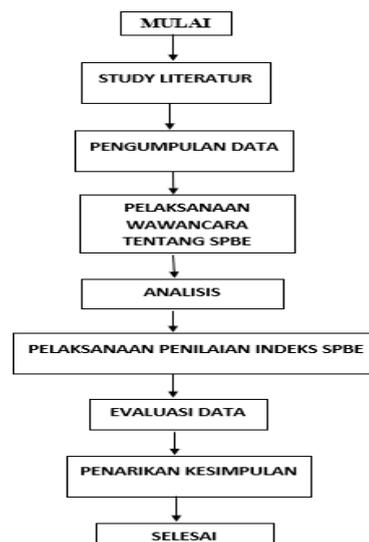
Tabel 3.2. Instrumen kuesioner penilaian

No	Aspek	Deskripsi pertanyaan	Nilai					Keterangan
			1	2	3	4	5	
1	Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE	Kebijakan tata kelola SPBE berdampak positif terhadap kualitas pelayanan publik						
		Seberapa puas dengan kebijakan tata kelola SPBE yang diterapkan di wilayah Purworejo						
2	Kebijakan Internal Layanan SPBE	Kebijakan internal layanan SPBE di instansi mudah dipahami?						
		Layanan elektronik pemerintah (SPBE) mudah diakses secara terbuka kepada masyarakat?						
3	Kelembagaan	Struktur kelembagaan pemerintah diketahui jelas dalam pelaksanaan dan fungsi pelayanan						
		Kelembagaan SPBE sudah berjalan sesuai dengan prinsip tata kelola						
		Lembaga pemerintah memiliki respon yang cepat terhadap keluhan masyarakat						
4	Strategi dan Perencanaan	Strategi dan perencanaan pemerintah memperhatikan kedepannya						
		Perencanaan pemerintah sudah disusun secara sistematis						
5	Teknologi Informasi dan Komunikasi	Teknologi informasi meningkatkan transparansi dalam pelayanan publik						
		Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi membantu meningkatkan kecepatan layanan publik						

6	Layanan Administrasi Pemerintah Berbasis Elektronik	Layanan administrasi pemerintah berbasis elektronik mudah diakses						
		Pelayanan merespon lebih cepat melalui sistem elektronik						
		Pengguna layanan elektronik meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat						
7	Layanan Publik Berbasis Elektronik	Layanan publik elektronik mempermudah dalam pengurusan administrasi						
		Informasi persyaratan layanan tersedia jelas di platform elektronik						
		Sistem pelayanan publik berbasis elektronik sudah berjalan dengan baik						
		Adanya layanan publik elektronik meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pemerintahan						

3.3 Tahapan Penelitian

Berbagai langkah penelitian disebut sebagai tahapan penelitian. Gambar 3.1 menunjukkan ringkasan tahapan penelitian.



Gambar 3.1. Tahapan Penelitian

Berdasarkan Gambar 3.1, penelitian ini melakukan tahapan-tahapan penelitian yang diawali dengan perumusan masalah, sehingga memudahkan peneliti dalam melakukan tahapan-tahapan tersebut. Data dikumpulkan untuk memperoleh informasi yang diperlukan untuk mencapai tujuan penelitian. Studi literatur dilakukan untuk menyediakan dasar untuk memperoleh dan mengembangkan landasan teori, kerangka pemikiran, dan menetapkan asumsi awal. Perhitungan poin dilakukan untuk menentukan nilai yang diperoleh dari pengumpulan data yang dilakukan. Analisis data dilakukan untuk memecahkan masalah dan menarik kesimpulan untuk pengambilan keputusan.

3.3.1 Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah salah satu bagian penting dari keseluruhan langkah-langkah metode penelitian (Nabila, 2021). Data yang diperoleh kemudian dievaluasi menggunakan metode analisis deskriptif. Metode analisis deskriptif melibatkan penyajian fakta-fakta yang diikuti oleh analisis. Tidak hanya mencakup deskripsi tetapi juga pemahaman dan penjelasan yang memadai. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif deskriptif yang meliputi telaah pustaka (library research). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan evaluasi dan penilaian indeks SPBE nasional pada tingkat kematangan kemampuan proses dan kemampuan pelayanan di Pemerintah Kabupaten Purworejo. Tinjauan pustaka dilakukan untuk mengumpulkan data penelitian dan membahas landasan teori.

Daftar pustaka yang menjadi dasar penelitian ini meliputi jurnal, panduan penilaian SPBE, dan artikel ilmiah hasil penelitian terdahulu.

3.3.2 Penyusunan Instrumen Pengukuran

Instrumen pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini adalah indeks evaluasi SPBE untuk memperoleh data tentang implementasi SPBE di Kabupaten Purworejo. Evaluasi terhadap penyelenggaraan SPBE dilakukan dengan menggunakan struktur penilaian yang meliputi: Domain, yaitu wilayah penyelenggaraan SPBE yang menjadi objek evaluasi.

1. Aspek merupakan bidang khusus penyelenggaraan SPBE yang menjadi objek penilaian.
2. Indikator mencakup informasi spesifik tentang aspek implementasi.

3.3.3 Analisis Data

Berikutnya, analisis data akan dilakukan. Hal ini melibatkan perhitungan untuk menentukan tingkat kematangan dan bobot, serta nilai indeks total tingkat kematangan setiap indikator SPBE.

Domain dan aspek diberi bobot yang mencerminkan perbedaan kepentingannya. Secara keseluruhan, domain pelayanan SPBE mendapat bobot sebesar 55%, domain tata kelola SPBE sebesar 28%, domain pelayanan SPBE sebesar 50%, dan

domain kebijakan internal SPBE sebesar 17%. Setiap aspek domain juga diberi nilai bobot berbeda tergantung pada relevansinya. Nilai bobot setiap indikator sekarang dapat ditentukan dengan membagi nilai bobot suatu aspek dengan jumlah indikator yang termasuk dalam aspek tersebut.

Berdasarkan Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi terhadap Sistem Pemerintah yang Didukung Secara Elektronik, dilakukan evaluasi SPBE. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (ESG) menjadi dasar perhitungan ESG pada awalnya.

Oleh karena itu, nama indikator diubah dari SPBE menjadi Indeks Kematangan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE). Indeks Kematangan SPBE didefinisikan sebagai skor yang menggambarkan tingkat kematangan penyelenggaraan SPBE di instansi pemerintah pusat dan daerah, yang mencakup tingkat kematangan kemampuan proses dan pelayanan.

Penyelenggaraan SPBE di Purworejo bertujuan untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang efisien, transparan, dan terpadu. Setelah SPBE terindeks, maka akan diambil kesimpulan berdasarkan penilaian yang telah dilakukan pada saat penelitian di lapangan.

Bab 4

Hasil dan Pembahasan

4.1.1 Lokasi Penelitian

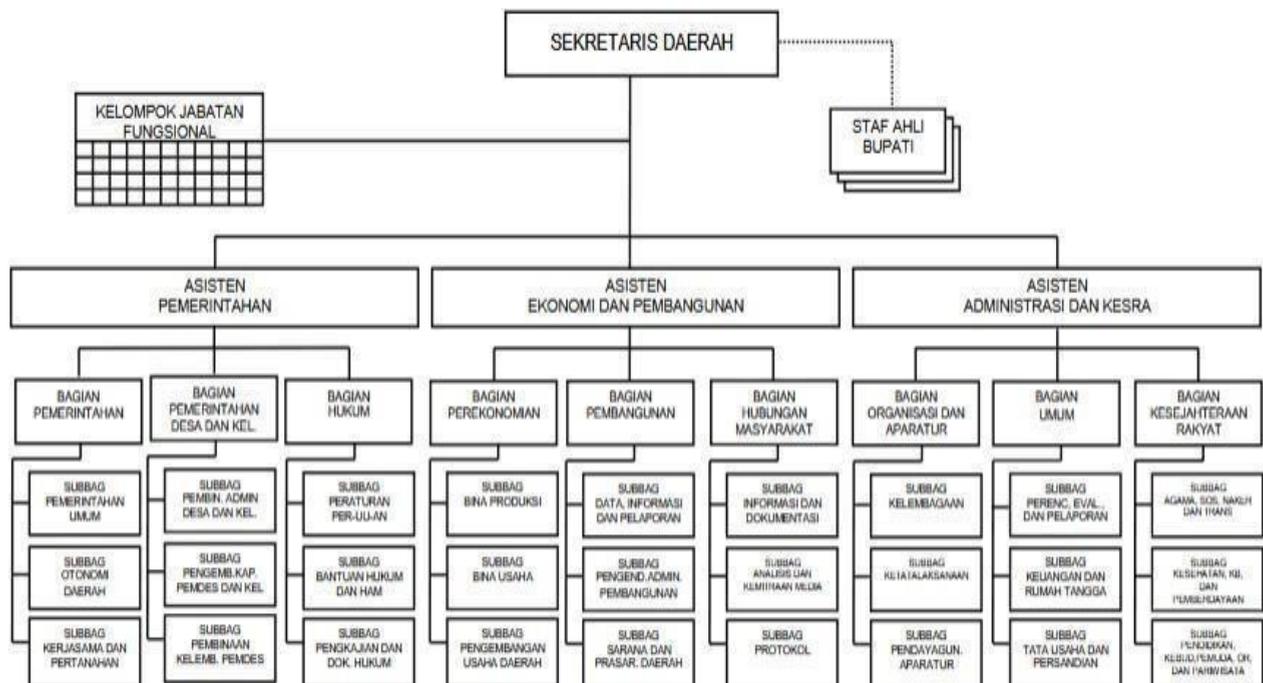
Kabupaten Purworejo, sebuah kabupaten di Jawa Tengah, memiliki potensi besar dalam berbagai sektor, terutama pertanian, pariwisata, dan industri kecil menengah. Namun, seperti daerah lainnya, Purworejo juga menghadapi tantangan seperti infrastruktur yang belum merata dan sumber daya manusia yang perlu ditingkatkan.



Gambar 4.1 Kantor Pemerintahan Purworejo

Pemerintah Kabupaten Purworejo terus berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai program pembangunan. Beberapa program unggulan yang telah dilakukan antara lain pembangunan infrastruktur, pengembangan sektor pertanian, dan peningkatan kualitas pendidikan. Visi dan

misi Pemkab Purworejo mencerminkan komitmen pemerintah untuk membangun Purworejo yang lebih maju, mandiri, dan sejahtera. Visi ini menjadi pedoman dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah. Pemerintah Purworejo memiliki struktur organisasi yang jelas, dengan bupati sebagai kepala daerah. Struktur pemerintahan ini berfungsi untuk menjalankan roda pemerintahan dan melayani masyarakat. Hal tersebut dapat dilihat pada gambar berikut ini.



Gambar 4.2 Struktur organisasi Pemkab Purworejo(setda.purworejokab.go.id)

Penerapan SPBE oleh Kabupaten Purworejo terus diupayakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan. Hal ini sejalan dengan tujuan nasional untuk mewujudkan *e-government* yang terintegrasi dan menyeluruh. Pemerintah Kabupaten Purworejo telah melakukan berbagai langkah untuk mengimplementasikan SPBE. Salah satunya adalah dengan menerbitkan

Peraturan Bupati Purworejo Nomor 23 Tahun 2023 tentang SPBE. Peraturan ini menjadi landasan hukum bagi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemkab Purworejo, mencakup berbagai aspek seperti tata kelola, manajemen, audit TIK, dan evaluasi SPBE. Sosialisasi peraturan ini juga gencar dilakukan kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk memastikan pemahaman dan implementasi yang tepat.

Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian (Dinkominfoasandi) Kabupaten Purworejo merupakan salah satu organisasi utama dalam pelaksanaan implementasi SPBE. Dinkominfoasandi bertugas untuk mengkoordinasikan, memfasilitasi, dan memantau pelaksanaan SPBE di seluruh OPD. Selain itu, Dinkominfoasandi juga menyelenggarakan berbagai kegiatan seperti sosialisasi, pelatihan, dan *workshop* terkait SPBE untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di bidang TIK. Meskipun telah ada kemajuan, implementasi SPBE di Purworejo juga menghadapi beberapa tantangan. Beberapa area yang perlu ditingkatkan antara lain kompetensi sumber daya manusia di bidang proses bisnis pemerintahan, arsitektur SPBE, data dan informasi, aplikasi SPBE, dan infrastruktur SPBE. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas SDM dan penguatan infrastruktur TIK menjadi fokus utama.

4.1.2 Analisis Data

Data pada penelitian ini didapatkan dari wawancara bersama narasumber ditambah dengan kuesioner yang dibagikan kepada 20 warga Purworejo secara acak. Adapun demografi responden dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4.1 Demografi responden kuesioner

No	Kategori	Jumlah
Gender		
1	Laki-Laki	12
2	Perempuan	8
Daerah tempat tinggal		
1	Pedesaan	13
2	Perkotaan	7
Usia		
1	<=20 Tahun	1
2	21-25 Tahun	3
3	26-30 Tahun	1
4	31-35 Tahun	13
5	=>36 Tahun	2

Sedangkan kriteria hasil penilaian dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.2 Kriteria hasil penilaian

No	Persentase	Kriteria
1	0-20	Sangat Buruk
2	21-40	Buruk
3	41-60	Cukup
4	61-80	Baik
5	81-100	Sangat Baik

Adapun hasil penelitian pada tiap indikator dapat dijabarkan sebagai berikut.

1. Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE

Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE memiliki 2 sub indikator. Dengan hasil rekap penilaian sebagai berikut.

Tabel 4.3 Hasil nilai setiap indikator

No	Responden	Nilai	
		Indikator 1	Indikator 2
1	Responden 1	3	3
2	Responden 2	4	4
3	Responden 3	4	5
4	Responden 4	3	4
5	Responden 5	3	3
6	Responden 6	4	4
7	Responden 7	4	4

No	Responden	Nilai	
		Indikator 1	Indikator 2
8	Responden 8	5	3
9	Responden 9	4	4
10	Responden 10	4	5
11	Responden 11	3	5
12	Responden 12	4	4
13	Responden 13	5	3
14	Responden 14	4	4
15	Responden 15	5	3
16	Responden 16	5	3
17	Responden 17	4	3
18	Responden 18	5	4
19	Responden 19	5	4
20	Responden 20	4	4
Jumlah		82	76

$$\text{Rata - rata Indikator} = \frac{\text{Jumlah Skor}}{\text{Jumlah Responden}}$$

$$\text{Indikator I : } \frac{82}{20} = 4,10$$

$$\text{Indikator II : } \frac{76}{20} = 3,80$$

$$\text{Nilai Aspek} = \frac{\text{Rata - rata indikator 1} + \text{Rata - rata indikator 2}}{2}$$

$$\text{Nilai Aspek} = \frac{4,10 + 3,80}{2}$$

$$= 3,95$$

Persentase

$$\text{Nilai Aspek} = \frac{3,95}{5} \times 100\% = 79\%$$

Berdasarkan hasil tersebut diketahui hasil 79%. Hal ini menunjukkan bahwa strategi dan perencanaan SPBE sudah baik. Hasil ini juga diperkuat dengan jawaban wawancara staff bidang TIK di Pemkab Purworejo yang menyatakan bahwa

" Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE di Pemkab Purworejo didasari oleh perencanaan yang matang dan komprehensif. Kami tidak serta merta mengadopsi teknologi tanpa analisis yang mendalam. Prosesnya dimulai

dengan analisis lingkungan, baik internal maupun eksternal. Analisis internal mencakup identifikasi kebutuhan dan permasalahan di setiap OPD, inventarisasi aset TIK yang ada, serta evaluasi kapabilitas SDM. Sementara analisis eksternal meliputi *benchmarking* dengan praktik terbaik di daerah lain, tren teknologi terkini, serta regulasi dan kebijakan SPBE nasional. Dari hasil analisis tersebut, kami menyusun rencana induk SPBE yang bersifat total dan terintegrasi. Rencana ini mencakup visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, program, dan kegiatan SPBE dalam jangka menengah dan panjang. Rencana induk ini juga diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan strategi pembangunan daerah lainnya.” (Hasil wawancara bersama Staff Bidang TIK)

Pernyataan yang sama juga disampaikan oleh staff bidang layanan publik yang menyatakan bahwa

”Dalam pelaksanaannya, kami membentuk tim koordinasi SPBE yang melibatkan perwakilan dari seluruh OPD. Tim ini bertugas untuk mengkoordinasikan implementasi SPBE di masing-masing unit kerja, memastikan keselarasan dengan rencana induk, serta memantau dan mengevaluasi pelaksanaannya. Kami juga menerapkan mekanisme monitoring dan evaluasi yang terstruktur dan berkelanjutan untuk memastikan SPBE berjalan sesuai rencana dan memberikan dampak yang optimal” (Hasil wawancara bersama Staf Pelaksana Layanan Publik)

Hasil kuesioner dan wawancara menunjukkan bahwa strategi dan perencanaan memang sudah berada dalam kategori baik. Hal ini berarti tidak perlu ada perbaikan pada tahap awal ini.

2. Kebijakan Internal Layanan SPBE

Kebijakan internal layanan SPBE di Pemkab Puworejo memiliki 2 sub indikator.

Adapun hasil kuesioner dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4.4 Hasil nilai setiap indikator

No	Responden	Nilai	
		Indikator 1	Indikator 2
1	Responden 1	2	2
2	Responden 2	2	2
3	Responden 3	3	2
4	Responden 4	2	3

No	Responden	Nilai	
		Indikator 1	Indikator 2
5	Responden 5	4	4
6	Responden 6	2	3
7	Responden 7	2	2
8	Responden 8	3	2
9	Responden 9	3	3
10	Responden 10	2	2
11	Responden 11	3	4
12	Responden 12	4	2
13	Responden 13	3	2
14	Responden 14	2	3
15	Responden 15	2	3
16	Responden 16	2	2
17	Responden 17	3	2
18	Responden 18	4	2
19	Responden 19	3	3
20	Responden 20	2	4
Jumlah		53	52

$$\text{Rata - rata Indikator} = \frac{\text{Jumlah Skor}}{\text{Jumlah Responden}}$$

$$\text{Indikator I : } \frac{53}{20} = 2,65$$

$$\text{Indikator II : } \frac{52}{20} = 2,6$$

$$\text{Nilai Aspek} = \frac{\text{Rata - rata indikator 1} + \text{Rata - rata indikator 2}}{2}$$

$$\text{Nilai Aspek} = \frac{2,65 + 2,6}{2}$$

$$= 2,625$$

Persentase

$$\text{Nilai Aspek} = \frac{2,625}{5} \times 100\% = 52\%$$

Berdasarkan hasil tersebut diketahui mendapat nilai 52%. dengan demikian berada pada kategori cukup baik. Hal ini menunjukkan bahwa Kebijakan internal layanan

SPBE belum terlaksana secara maksimal. Hasil ini juga disampaikan oleh staff bidang TIK di Pemkab Purworejo yang menyatakan bahwa

"OPD sudah berupaya menerapkan SPBE sesuai dengan arahan dari Dinkominfo (Dinas Komunikasi dan Informatika), tapi memang masih banyak tantangan. Keterbatasan SDM yang kompeten di bidang TIK menjadi kendala utama. Selain itu, koordinasi antar unit kerja di dalam OPD juga belum optimal. Masing-masing unit cenderung fokus pada kebutuhan dan sistemnya sendiri." (Hasil wawancara bersama Staff Bidang TIK)

Jawaban tersebut menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan tata kelola SPBE masih belum maksimal karena memiliki beberapa keterbatasan yang berpengaruh. Dengan demikian pada sektor ini memang perlu perbaikan.

3. Kelembagaan

Indikator ini masih berhubungan dengan indikator sebelumnya namun tetap memiliki sub indikatornya tersendiri. Adapun hasil penilaian responden pada indikator ini dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4.5 Hasil nilai setiap indikator

No	Responden	Nilai		
		Indikator 1	Indikator 2	Indikator 3
1	Responden 1	1	3	2
2	Responden 2	2	2	3
3	Responden 3	2	3	3
4	Responden 4	3	3	2
5	Responden 5	2	2	2
6	Responden 6	2	3	2
7	Responden 7	4	4	3
8	Responden 8	3	3	4
9	Responden 9	2	2	2
10	Responden 10	2	2	2
11	Responden 11	3	2	3
12	Responden 12	2	3	2
13	Responden 13	3	4	4
14	Responden 14	2	2	2
15	Responden 15	2	2	2
16	Responden 16	2	3	2
17	Responden 17	3	2	2
18	Responden 18	2	4	2
19	Responden 19	4	2	3
20	Responden 20	3	3	2
Jumlah		49	54	49

$$\text{Rata - rata Indikator} = \frac{\text{Jumlah Skor}}{\text{Jumlah Responden}}$$

$$\text{Indikator I : } \frac{49}{20} = 2,45$$

$$\text{Indikator II : } \frac{54}{20} = 2,7$$

$$\text{Indikator III : } \frac{49}{20} = 2,45$$

Nilai Aspek

$$= \frac{\text{Rata - rata indikator 1} + \text{Rata - rata indikator 2} + \text{Rata - rata indikator 3}}{3}$$

$$\begin{aligned} \text{Nilai Aspek} &= \frac{2,45 + 2,7 + 2,45}{3} \\ &= 2,53 \end{aligned}$$

Persentase

$$\text{Nilai Aspek} = \frac{2,53}{5} \times 100\% = 50\%$$

Berdasarkan hasil tersebut diketahui bahwa nilai 50% artinya pada sektor ini juga masih perlu beberapa perbaikan. Hasil wawancara juga mendapatkan hasil bahwa memang ada kekurangan terhadap kematangan pelayanan SPBE seperti yang diungkapkan staff bidang TIK berikut ini.

"Banyak kendala yang kami hadapi. Pertama, infrastruktur TIK masih terbatas, seperti koneksi internet yang kurang stabil di beberapa wilayah dan perangkat yang sudah usang. Kedua, SDM di bidang TIK juga masih kurang, baik dari segi jumlah maupun kompetensi. Kami seringkali kesulitan untuk mengembangkan aplikasi baru atau memelihara sistem yang

sudah ada. Ketiga, koordinasi antar OPD terkait pengembangan SPBE juga belum optimal."(Hasil wawancara bersama Staff Bidang TIK)

Hal yang sama juga disampaikan oleh salah satu warga Purworejo yang menyatakan bahwa

"Sejujurnya, saya masih lebih sering mengurus langsung ke kantor. Beberapa layanan memang sudah bisa diakses online, tapi seringkali website-nya sulit diakses, informasinya kurang jelas, atau prosesnya rumit. Pernah saya coba daftar sesuatu online, tapi akhirnya tetap harus datang ke kantor untuk verifikasi berkas. Jadi, menurut saya, belum sepenuhnya efektif dan memudahkan."

Dari hasil wawancara tersebut terlihat bahwa aspek utama yang belum baik adalah akses ke *website* yang sulit dan kurang jelas. Artinya bahwa beberapa warga masih kesulitan dalam mengakses *website* pemerintah dan terkadang ada pilihan yang masih belum dipahami oleh warga. Oleh karena ini pada aspek ini juga perlu ada perbaikan.

4. Strategi dan Perencanaan

Indikator strategi dan perencanaan disini berarti menilai aspek tanggung jawab dan manajemen lembaga dari Pemkab Purworejo dalam meningkatkan indeks SPBE..

Hasil penilaian aspek kelembagaan adalah sebagai berikut.

Tabel 4.6 Hasil nilai setiap indikator

No	Responden	Nilai	
		Indikator 1	Indikator 2
1	Responden 1	4	1
2	Responden 2	3	2
3	Responden 3	4	1
4	Responden 4	4	2
5	Responden 5	3	2
6	Responden 6	3	3
7	Responden 7	5	3
8	Responden 8	3	4
9	Responden 9	4	3
10	Responden 10	3	1
11	Responden 11	4	1
12	Responden 12	4	3
13	Responden 13	3	2

No	Responden	Nilai	
		Indikator 1	Indikator 2
14	Responden 14	4	3
15	Responden 15	5	2
16	Responden 16	3	3
17	Responden 17	4	3
18	Responden 18	3	3
19	Responden 19	3	2
20	Responden 20	2	1
Jumlah		71	45

$$\text{Rata - rata Indikator} = \frac{\text{Jumlah Skor}}{\text{Jumlah Responden}}$$

$$\text{Indikator I : } \frac{71}{20} = 3,55$$

$$\text{Indikator II : } \frac{45}{20} = 2,25$$

$$\text{Nilai Aspek} = \frac{\text{Rata - rata indikator 1} + \text{Rata - rata indikator 2}}{2}$$

$$\text{Nilai Aspek} = \frac{3,55 + 2,25}{2}$$

$$= 2,9$$

Persentase

$$\text{Nilai Aspek} = \frac{2,9}{5} \times 100\% = 58\%$$

Indikator strategi dan perencanaan di Pemkab Purworejo 58% yang artinya pada sektor ini juga masih perlu beberapa perbaikan. Hasil wawancara juga mendapatkan hasil bahwa memang ada kekurangan terhadap kematangan pelayanan SPBE seperti yang diungkapkan oleh warga Purworejo yang diwawancarai secara acak yang menyatakan bahwa

"Saya coba urus berkas online, katanya lebih mudah. Tapi website-nya kadang itu lambat sekali dan kadang error. Setelah beberapa kali mencoba, akhirnya bisa juga masuk, tapi formulirnya susah dimengerti. Saya juga bingung berkas apa saja yang harus diunggah. Akhirnya saya menyerah dan memilih datang langsung ke kantor kecamatan. Lebih repot memang, tapi setidaknya pasti selesai." (Hasil wawancara bersama warga Purworejo)

Warga lain juga menyatakan hal yang serupa bahwa

"Yang paling utama ya website-nya itu, susah diakses dan informasinya kurang jelas. Seharusnya dibuat lebih user-friendly lah, mudah dimengerti orang awam seperti saya. Petunjuknya juga harus lengkap, biar tidak bingung berkas apa saja yang dibutuhkan." (Hasil wawancara bersama warga Purworejo)

Dari hasil wawancara dan penilaian diketahui bahwa ketidakpuasan warga terletak pada sulitnya mengakses *website* dan terkadang tampilannya juga kurang dimengerti. Oleh karena itu pada aspek *website* memang membutuhkan perbaikan.

5. Teknologi Informasi dan Komunikasi

Aspek layanan administrasi merujuk pada dua sub indikator yaitu respon masyarakat terhadap layanan administrasi dan kecepatan tanggap layanan administrasi.

Tabel 4.7 Hasil nilai setiap indikator

No	Responden	Nilai	
		Indikator 1	Indikator 2
1	Responden 1	1	4
2	Responden 2	2	3
3	Responden 3	1	4
4	Responden 4	2	4
5	Responden 5	2	3
6	Responden 6	3	3
7	Responden 7	3	5
8	Responden 8	4	3
9	Responden 9	3	4
10	Responden 10	2	1
11	Responden 11	2	3
12	Responden 12	3	2
13	Responden 13	2	3
14	Responden 14	4	2
15	Responden 15	2	3
16	Responden 16	2	3
17	Responden 17	3	3

No	Responden	Nilai	
		Indikator 1	Indikator 2
18	Responden 18	2	2
19	Responden 19	2	2
20	Responden 20	3	3
Jumlah		48	60

$$\text{Rata - rata Indikator} = \frac{\text{Jumlah Skor}}{\text{Jumlah Responden}}$$

$$\text{Indikator I : } \frac{48}{20} = 2,4$$

$$\text{Indikator II : } \frac{60}{20} = 3$$

$$\begin{aligned} \text{Nilai Aspek} &= \frac{\text{Rata - rata indikator 1} + \text{Rata - rata indikator 2}}{2} \\ \text{Nilai Aspek} &= \frac{2,4 + 3}{2} \\ &= 2,7 \end{aligned}$$

Persentase

$$\text{Nilai Aspek} = \frac{2,7}{5} \times 100\% = 54\%$$

Pada aspek ini mendapat nilai 54% hal ini juga diketahui dari hasil wawancara bersama warga Purworejo yang menyatakan bahwa

"Di desa kami sinyalnya masih susah, Mbak. Kadang ada, kadang hilang. Walaupun ada, lemot sekali. Mau buka website pemerintah saja lama sekali, sering gagal. Akhirnya saya lebih memilih bertanya langsung ke perangkat desa atau tetangga yang punya kenalan di kota." (Hasil wawancara bersama warga Purworejo)

Warga lain menyatakan bahwa

"Selain tampilan website-nya yang kurang nyaman di HP, saya juga kurang paham istilah-istilah yang digunakan di formulir online. Seharusnya dibuat lebih sederhana dan mudah dimengerti orang awam seperti saya. Selain itu ya

harapannya sinyal internet di desa kami diperbaiki, biar lancar. Kalau internet lancar, mungkin saya bisa coba pakai layanan online itu. Biar tidak perlu repot-repot ke kota." (Hasil wawancara bersama warga Purworejo)

Berdasarkan hal tersebut maka dapat diketahui bahwa tampilan *website* masih menjadi fokus utama untuk rencana perbaikan indeks SPBE.

6. Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik

Indikator ini juga masih berhubungan dengan indikator sebelumnya sehingga hasil penilaiannya juga memiliki kemiripan. Ada 3 sub indikator pada aspek ini yaitu kapabilitas layanan publik berbasis elektronik, respon masyarakat, dan kecepatan tanggap layanan publik. Hasil penilaian pada aspek ini adalah sebagai berikut.

Tabel 4.8 Rekap penilaian layanan publik SPBE

No	Responden	Nilai		
		Indikator 1	Indikator 2	Indikator 3
1	Responden 1	4	1	1
2	Responden 2	3	2	2
3	Responden 3	4	1	1
4	Responden 4	4	2	2
5	Responden 5	3	2	2
6	Responden 6	3	3	3
7	Responden 7	5	3	3
8	Responden 8	3	4	3
9	Responden 9	4	3	5
10	Responden 10	4	2	3
11	Responden 11	2	2	4
12	Responden 12	2	3	3
13	Responden 13	3	2	3
14	Responden 14	3	4	3
15	Responden 15	2	2	2
16	Responden 16	3	2	3
17	Responden 17	4	3	4
18	Responden 18	3	2	3
19	Responden 19	4	2	2
20	Responden 20	4	3	3
Jumlah		67	48	55

$$\text{Rata - rata Indikator} = \frac{\text{Jumlah Skor}}{\text{Jumlah Responden}}$$

$$\text{Indikator I : } \frac{67}{20} = 3,35$$

$$\text{Indikator II : } \frac{48}{20} = 2,4$$

$$\text{Indikator III : } \frac{55}{20} = 2,75$$

Nilai Aspek

$$\begin{aligned} & \text{Rata - rata indikator 1 + Rata - rata indikator 2 + rata - rata indikator 3} \\ = & \frac{\hspace{10em}}{3} \\ & \text{Nilai Aspek} = \frac{3,35 + 2,4 + 2,75}{3} \\ & = 2,83 \end{aligned}$$

Persentase

$$\text{Nilai Aspek} = \frac{2,83}{5} \times 100\% = 56\%$$

Sama seperti poin sebelumnya bahwa aspek ini mendapat nilai 56%. Respon masyarakat terhadap SPBE menjadi nilai terendah. Hal ini mungkin disebabkan oleh belum jelasnya penggunaan SPBE terutama pada masyarakat dipedesaan. Hal ini diungkapkan oleh salah satu warga Purworejo yang menyatakan bahwa

"Menurut saya, akses masih menjadi masalah utama. Selain masalah sinyal internet di beberapa wilayah, banyak juga masyarakat yang belum memiliki perangkat yang memadai, seperti smartphone atau komputer. Apalagi masyarakat ekonomi menengah ke bawah." (Hasil wawancara bersama warga Purworejo)

Dari hasil wawancara dan penilaian tersebut diketahui bahwa SPBE Pemkab Purworejo masih dianggap kurang ramah dengan perangkat yang dimiliki masyarakat. Oleh karena itu perbaikan perlu dilakukan juga pada aspek ini.

7. Layanan Publik Berbasis Elektronik

Aspek yang terakhir adalah aspek terpenting dalam SPBE yaitu teknologi informasi dan komunikasi yang dimiliki oleh Pemkab Purworejo. Ada 4 sub indikator pada aspek ini yaitu ketepatan penggunaan aplikasi, penerimaan *feedback* pelanggan, kemudahan menggunakan aplikasi, dan layanan *customer service*. Adapun hasil kuesioner dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4.9 Hasil nilai setiap indikator

No	Responden	Nilai			
		Indikator 1	Indikator 2	Indikator 3	Indikator 4
1	Responden 1	4	2	3	1
2	Responden 2	3	2	2	2
3	Responden 3	4	3	2	1
4	Responden 4	4	4	2	2
5	Responden 5	3	3	4	2
6	Responden 6	3	2	3	3
7	Responden 7	5	3	4	3
8	Responden 8	3	2	4	3
9	Responden 9	4	2	3	5
10	Responden 10	1	3	3	3
11	Responden 11	2	2	5	4
12	Responden 12	1	4	3	3
13	Responden 13	2	3	4	4
14	Responden 14	2	4	1	3
15	Responden 15	3	4	2	4
16	Responden 16	3	3	1	4
17	Responden 17	2	3	2	3
18	Responden 18	2	5	2	3
19	Responden 19	3	3	3	5
20	Responden 20	4	4	3	3
Jumlah		58	61	56	61

$$\text{Rata - rata Indikator} = \frac{\text{Jumlah Skor}}{\text{Jumlah Responden}}$$

$$\text{Indikator I : } \frac{58}{20} = 2,9$$

$$\text{Indikator II : } \frac{61}{20} = 3,05$$

$$\text{Indikator III : } \frac{56}{20} = 2,8$$

$$\text{Indikator III : } \frac{61}{20} = 3,05$$

Nilai Aspek = Nilai Aspek

$$= \frac{\text{Rata indikator 1} + \text{Rata indikator 2} + \text{Rata indikator 3} + \text{Rata indikator 4}}{4}$$

$$\begin{aligned} \text{Nilai Aspek} &= \frac{2,9 + 3,05 + 2,8 + 3,05}{4} \\ &= 2,95 \end{aligned}$$

Persentase

$$\text{Nilai Aspek} = \frac{2,95}{5} \times 100\% = 59\%$$

Hasil penilaian kuesioner menunjukkan bahwa tingkat TIK dengan nilai 59%.

Hampir sama dengan sebelumnya kendala seperti keterbatasan sumber daya dan tampilan *website* masih menjadi kendala utama. Hal tersebut diungkapkan oleh staff TIK Pemkab Purworejo berikut ini.

”Sebenarnya pernah di audit dari sudut pandang UI/UX. Hasilnya adalah *website* SPBE Purworejo masih perlu banyak perbaikan. Desain visualnya kurang menarik dan tidak konsisten. Tipografinya kurang terbaca, layout-nya kurang rapi, dan penggunaan warnanya juga kurang harmonis. Dari sisi UX, *website* ini kurang intuitif dan user-friendly.

Alur penggunaan layanannya kurang jelas dan beberapa fitur penting sulit ditemukan.” (Hasil wawancara bersama Staff Bidang TIK)

Dari hasil penilaian dan wawancara tersebut diketahui bahwa masih butuh perbaikan pada aspek TIK di Pemkab Purworejo.

4.1.3 Resume Score

Tabel 5.0 Resume Skor Setiap Aspek

No	Aspek	Indeks	Skor
1	Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE	3,95	79%
2	Kebijakan Internal Layanan SPBE	2,62	52%
3	Kelembagaan	2,53	50%
4	Strategi dan Perencanaan	2,9	58%
5	Teknologi Informasi dan Komunikasi	2,7	54%
6	Layanan Administrasi Pemerintah Berbasis Elektronik	2,83	56%
7	Layanan Publik Berbasis Elektronik	2,95	59%
Rata-rata		2,92	58%

4.1.4 Rekomendasi Perbaikan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih ada beberapa aspek yang perlu diperbaiki untuk meningkatkan indeks SPBE di Pemkab Purworejo. Rencana perbaikan tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut.

1. Rekomendasi Perbaikan Pada Aspek Kelembagaan

Berdasarkan nilai terendah diperoleh pada aspek kelembagaan pada indikator pertama dan ketiga, dari nilai terendah tersebut dibutuhkannya pelatihan untuk meningkatkan kemampuan dalam mengoperasikan teknologi informasi dan memberikan layanan publik yang efisien,

2. Rekomendasi Perbaikan Infrastruktur

Peningkatan indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Kabupaten Purworejo membutuhkan pendekatan menyeluruh yang mencakup berbagai aspek, salah satunya adalah pembenahan infrastruktur pendukung. Pernyataan "*website* pemerintah sulit diakses karena susah untuk dibuka dan internet yang kurang memadai" sangat mempengaruhi efektivitas implementasi SPBE. Hal ini disebabkan koneksi internet yang masih belum merata. Selain itu, kecepatan internet juga menjadi salah satu pengaruh yang perlu untuk diperhatikan. Faktor selanjutnya disebabkan karena *bandwith* yang dirasa juga perlu ditingkatkan berdasarkan pemaparan dari pegawai yang diwawancarai.

Infrastruktur TIK merupakan tulang punggung SPBE. Tanpa infrastruktur yang handal dan memadai, implementasi SPBE tidak akan berjalan optimal. Masyarakat tidak akan dapat mengakses layanan *online* dengan lancar jika kualitas internet buruk atau *website* pemerintah sulit diakses. Oleh karena itu, perbaikan infrastruktur pendukung SPBE merupakan langkah yang sangat penting untuk meningkatkan indeks SPBE Purworejo.

Domain *website* pemerintah daerah merupakan identitas *online* yang penting. Domain yang profesional dan mudah diingat akan memudahkan masyarakat untuk mengakses *website* pemerintah. Pemilihan domain yang tepat juga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap *website* pemerintah. Selain itu, pengelolaan domain yang baik juga penting untuk memastikan *website* tetap *online* dan dapat diakses kapan saja.

Kualitas internet merupakan faktor krusial dalam implementasi SPBE. Kecepatan dan stabilitas koneksi internet sangat memengaruhi pengalaman pengguna saat

mengakses layanan *online*. Koneksi internet yang lambat atau tidak stabil akan membuat pengguna frustrasi dan enggan menggunakan layanan *online* lagi. Oleh karena itu, peningkatan kualitas internet di Purworejo menjadi prioritas utama. Beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk memperbaiki infrastruktur pendukung SPBE terkait domain *website* antara lain: memastikan domain *website* pemerintah daerah mudah diingat dan relevan dengan identitas daerah, mengelola domain secara profesional dan rutin melakukan perpanjangan, serta mengimplementasikan sistem keamanan yang memadai untuk melindungi domain dari serangan *cyber*.

Untuk meningkatkan kualitas internet di Purworejo, Pemkab dapat bekerja sama dengan penyedia layanan internet (ISP) untuk memperluas jangkauan dan meningkatkan kapasitas jaringan. Pembangunan infrastruktur jaringan *fiber optic* dan peningkatan kapasitas *bandwidth* dapat menjadi solusi untuk meningkatkan kecepatan dan stabilitas internet. Selain itu, Pemkab juga dapat memanfaatkan teknologi *wireless* seperti *Wi-Fi* untuk menyediakan akses internet gratis di tempat-tempat publik, seperti kantor desa, puskesmas, dan tempat wisata. Hal ini dapat membantu masyarakat yang belum memiliki akses internet di rumah untuk tetap dapat mengakses layanan SPBE.

Ketersediaan infrastruktur yang memadai di seluruh wilayah Purworejo juga penting untuk memastikan pemerataan akses layanan SPBE. Pemerintah perlu memastikan bahwa masyarakat di wilayah pedesaan dan daerah terpencil juga memiliki akses internet yang memadai untuk dapat memanfaatkan layanan *online*. Investasi dalam infrastruktur TIK memang membutuhkan biaya yang tidak sedikit, namun manfaatnya akan sangat besar dalam jangka panjang. Dengan infrastruktur

yang handal, layanan publik dapat diselenggarakan dengan lebih efisien, transparan, dan akuntabel. Hal ini akan meningkatkan kepuasan masyarakat dan mendukung terwujudnya *good governance*. Dengan perbaikan infrastruktur pendukung seperti domain *website* dan kualitas internet, Pemkab Purworejo dapat meningkatkan aksesibilitas layanan SPBE bagi seluruh masyarakat. Hal ini akan berdampak positif terhadap peningkatan indeks SPBE dan mewujudkan pemerintahan yang lebih modern dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Bab 5

Penutup

5.1.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan maka dapat disimpulkan bahwa

1. Berdasarkan hasil penelitian menggunakan 7 aspek dalam wawancara didapatkan rata-rata pada setiap aspek. Aspek Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE mendapatkan nilai 79% dengan indeks 3,95 , aspek Kebijakan Internal Layanan SPBE bernilai 52% dengan indeks 2,62, aspek Kelembagaan 50% dengan indeks 2,53, aspek Strategi dan Perencanaan 58% dengan indeks 2,9, aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi 54% dengan indeks 2,7, aspek Layanan Administrasi Pemerintah Berbasis Elektronik 56% dengan indeks 2,83, dan aspek Layanan Publik Berbasis Elektronik 59% dengan indeks 2,95, dan rata-rata semua aspek 58% dengan indeks 2,92.
2. Upaya peningkatan indeks SPBE dengan perbaikan pada kualitas sumber daya manusia (SDM), perbaikan kualitas website yang terintegrasi dengan SPBE, dan perbaikan infrastruktur melalui kerja sama dengan penyedia layanan internet (ISP) untuk memperluas jangkauan dan meningkatkan kapasitas jaringan.

5.1.2 Saran

Adapun beberapa saran yang bisa diberikan pada penelitian ini

1. Perbaikan yang bisa dilaksanakan yaitu perbaikan pada kualitas sumber daya manusia (SDM), khususnya di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), perbaikan kualitas website yang terintegrasi dengan SPBE, dan perbaikan infrastruktur sehingga mempermudah masyarakat untuk mengakses website yang berkaitan dengan SPBE.
2. Dilakukan pengecekan berkala pada sistem untuk meminimalisir terjadinya kendala untuk mempermudah masyarakat,
3. Dapat dilakukan uji kesuksesan dalam penggunaan SPBE pada masyarakat sekitar.

Daftar Acuan

- Anugerah, F. Y., & Parwanti, L. S. (2024). Reformasi Birokrasi melalui Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Diskominsta Kota Magelang. *Journal of Public Administration and Local Governance*, 8(2), 124-135.
- Astuti, N. P. J., Sukarsa, I. M., & Raharja, I. M. S. (2021). Analisis Aspek Penerapan SPBE pada Salah Satu Kabupaten di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Teknologi Dan Komputer*, 2(3), 571–577.
- Bazarah, J., Jubaidi, A., & Hubaib, F. (2021). Konsep Pelayanan Publik di Indonesia (Analisis Literasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Indonesia). *DEDIKASI: Jurnal Ilmiah Sosial, Hukum, Budaya*, 22(2), 105-122.
- Bouty, A. A., Koniyo, M. H., & Novian, D. (2019). Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Menggunakan E-Government Maturity Model (Kasus di Pemerintah Kota Gorontalo). *Jurnal Penelitian Komunikasi Dan Opini Publik*, 23(1). <https://doi.org/10.33299/jpkop.23.1.1758>
- Burlacu, S., Patarlageanu, S. R., Diaconu, A., & Ciobanu, G. (2021). *E-government* in the Era of Globalization and the Health Crisis caused by the Covid-19 Pandemic, between Standards and Innovation. *SHS Web of Conferences*, 92, 08004. <https://doi.org/10.1051/shsconf/20219208004>
- Dinar, K. R., Fajrillah, A. A. N., & Hanafi, R. (2023). Penyusunan Arsitektur Enterprise Pada Bidang Perindustrian Dalam Meningkatkan Stabilitas Perekonomian Jawa Barat Menggunakan Metode Togaf Adm 9.2. *JUPI (Jurnal Ilmiah Penelitian dan Pembelajaran Informatika)*, 8(1), 218-229.
- Dipa P, P., Putri, G., & Sasmita, G. (2020). Evaluasi SPBE pada Dinas Kesehatan Salah Satu Kabupaten di Bali. *JITTER : Jurnal Ilmiah Teknologi Dan Komputer*, 1(2), 76-85. doi:10.24843/jitter.v1i2.65614.
- Dwianggoro, B. R., & Narulita, L. F. (2024). Evaluasi dan Pengembangan Layanan Sistem Informasi PPID Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur Dengan Menggunakan Standar dan Teknis Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). *Jurnal Rekayasa Sistem Informasi dan Teknologi*, 1(3), 76-85.
- Esselimani, S., Sagsan, M., & Kiralp, S. (2021). *E-government* Effect on Participatory Democracy in the Maghreb: Indirect Effect and Government-Led Participation. *Discrete Dynamics in Nature and Society*, 2021, 1–13. <https://doi.org/10.1155/2021/6642998>
- Juniyengsi, V. (2024). Analisis Kesiapan Penyelenggaraan SPBE di Kabupaten Sindereng Rappang. *Jurnal Sosial Humaniora*, 1(2), 130-154.

- Komara, M. A., Ekowati, M. A. S., Andrianto, A., Dharmawan, T., & Prasetyo, B. (2024). *MANAJEMEN TEKNOLOGI INFORMASI: STRATEGI DAN PRAKTIK TERBAIK*. Bandung: PT Grafita
- Malodia, S., Dhir, A., Mishra, M., & Bhatti, Z. A. (2021). Future of *e-government: An integrated conceptual framework*. *Technological Forecasting and Social Change*, 173, 121102. <https://doi.org/10.1016/j.techfore.2021.121102>
- Menkumham, (2018). *Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 95 Tahun 2020 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik*. Pemerintah Pusat Republik Indonesia Tahun 2018
- Muka, I. W., Widyatmika, M. A., & Putra, I. K. G. D. (2020). Pengembangan Rencana Induk Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Provinsi Bali. *Jurnal Bali Membangun Bali*, 1(3), 253-276.
- Mutia, G. A. (2024). *Komunikasi Inovasi Pelayanan Publik Melalui Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik Di Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Rokan Hilir* (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU).
- Nabila, A. (2021). *Evaluasi Tingkat Kematangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Spbe) Menggunakan Permenpan Nomor 59 Tahun 2020*. 126.
- Naufal 'afaf. (2022). *Terhadap Kematangan E-Government Skripsi Oleh : Nama : Izdihar Naufal ' Afaf Fakultas Bisnis Dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia Yogyakarta*.
- Pratiwi, H. D., Hayuhardhika, W., Putra, N., & Herlambang, A. D. (2020). Evaluasi Penerapan E-Government Di Pemerintah Kabupaten Sumbawa Besar Menggunakan Kerangka Kerja Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). *Jurnal Pengembangan Teknologi Informasi Dan Ilmu Komputer*, 4(11), 4116–4124.
- Qotrunnisa, A. S., (2021). Model Arsitektur Layanan Administrasi Pemerintahan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Spbe) Pemerintah Daerah Kuningan. *JIKO (Jurnal Informatika Dan Komputer)*, 4(3), 187–192. <https://doi.org/10.33387/jiko.v4i3.3424>
- Rahmah, Y., Putra, W. H. N., & Herlambang, A. D. (2020). Evaluasi Tingkat Keamanan Informasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mojokerto dengan Menggunakan Indeks KAMI. *Jurnal Pengembangan Teknologi Informasi Dan Ilmu Komputer*, 4(3), 840–847. Diambil dari <https://j-ptiik.ub.ac.id/index.php/j-ptiik/article/view/7067>
- Ramadhan, I. (2019). Strategi Keamanan Cyber Security di Kawasan Asia Tenggara. *Jurnal Asia Pacific Studies*, 3(2), 181-192.
- Suhermawan, S. F. N., Mulyana, R., & Ramadani, L. (2023). Analisis Pengaruh Tata Kelola Ti Terhadap Transformasi Digital Dan Kinerja Kementerian Agama. *JUPI (Jurnal Ilmiah Penelitian dan Pembelajaran Informatika)*, 8(2), 370-380.

- Sumijan, & Purnama, P. A. W. (2020). Analisis Dan Evaluasi Tingkat Kematangan E-Government pada Information Architecture menggunakan Framework Cobit 5 (Studi Kasus : Pemerintah Daerah Kota Padang). *Seminar Nasional Teknologi Informasi, Komunikasi Dan Industri (SNTIKI)*, 12(1), 1–10.
- Supriyanto, S., Ridwan, A., Tamam, R., Santoso, M. I., Satria, D., & Mutaqin, A. I. S. (2021). Perancangan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) yang berkelanjutan di Provinsi Banten. *Journal Industrial Servicess*, 7(1), 171. <https://doi.org/10.36055/12952>
- Susilo E. H., Tranformasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral melalui Optimalisasi Teknologi Informasi Terintegrasi, *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 5(3), 8101-8121
- Susilo, E. H. (2021). Tranformasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral melalui Optimalisasi Teknologi Informasi Terintegrasi. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 5(3), 8101-8121.
- Sutedi, S. H. (2024). *Hukum perizinan dalam sektor pelayanan publik*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Taqiya, N. A., Mukaromah, S., & Pratama, A. (2020). Analisis Tingkat Kematangan Spbe Di Dinas Komunikasi Dan Informatika Jawa Timur. *Scan: Jurnal Teknologi Informasi dan Komunikasi*, 15(1), 22-33.
- Trianto, N., Sidabutar, J., & Faridh, R. M. (2024). *Integrasi Keamanan Jaringan Intra Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Menggunakan Next-Generation Firewall (NGFW)*.
- Twizeyimana, J. D., & Andersson, A. (2019). The public value of E-government – A literature review. *Government Information Quarterly*, 36(2), 167–178. <https://doi.org/10.1016/j.giq.2019.01.001>
- Wessiani, N. A., Suwignjo, P., Pratiwi, A. A., & Pramesti, T. W. (2021). Development of a Maturity Model based on the Input, Process, and Output Aspects of E-government. *Proceedings of the 11th Annual International Conference on Industrial Engineering and Operations Management Singapore*, 7(11).
- Yuhfizar, Sanjani, H., & Chadri, R. (2019). PENERAPAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (E-GOVERNMENT) DENGAN PENDEKATAN BOTTOM-UP BERBASIS WEB DI SUMATERA BARAT. *SEMINAR NASIONAL MULTIDISPLIN ILMU Inovasi Produk Penelitian Pengabdian Masyarakat & Tantangan Era Revolusi Industri 4.0*, 2(1). Australian Government Publishing Service. 1994. *Style manual for authors*,

LAMPIRAN

